

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi 2005-2010 telah ditetapkan 4 agenda pembangunan yaitu :

1. Agenda meningkatkan daya saing ekonomi
2. Agenda meningkatkan kemampuan dan pemerataan pembangunan daerah
3. Agenda meningkatkan kesejahteraan dan kehidupan masyarakat yang berkualitas
4. Agenda meningkatkan pembangunan hukum dan tata pemerintahan yang baik

Keempat agenda tersebut merupakan pilar pokok untuk mencapai visi “**Jambi Mampu, Maju dan Mandiri**” dan dilaksanakan secara simultan, karena keberhasilan pelaksanaan satu agenda akan ditentukan oleh kemampuan pelaksanaan agenda lainnya. Dalam kaitan itu, maka perlu disusun prioritas pembangunan tahunan dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut :

1. Memiliki dampak yang signifikan terhadap pencapaian sasaran–sasaran pembangunan, terutama sasaran–sasaran yang terukur sehingga langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
2. Penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan.
3. Merupakan tugas pemerintah sebagai pelaku utama pembangunan.
4. Realistis untuk dilaksanakan.

Sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah dan sesuai amanat undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), RKPD memuat prioritas pembangunan, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi, lintas Provinsi Jambi, dan lintas wilayah yang tercerminkan dalam bentuk (i) kerangka regulasi dan (ii) kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Dengan demikian RKPD merupakan pedoman bagi Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dimana kebijakan APBD ditetapkan secara bersama-sama oleh dewan perwakilan rakyat Daerah (DPRD) dan pemerintah, yang mempunyai fungsi pokok :

1. Menjadi acuan bagi seluruh SKPD Provinsi, kabupaten/ kota karena memuat seluruh kebijakan publik.
2. Menjadi pedoman dalam menyusun APBD, karena memuat arah kebijakan pembangunan daerah satu tahun dan,
3. Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen pemerintah.

Dengan demikian RKPD Provinsi Jambi merupakan pedoman bagi pemerintah Provinsi Jambi dalam penyusunan RKPD Provinsi Jambi. Buku RKPD tahun 2010 ini juga dilengkapi dengan buku II yang secara rinci menguraikan tentang program dan kegiatan beserta pembiayaannya.

1.2. LANDASAN HUKUM.

Undang – undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang No. 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta undang-undang No:32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah mengamatkan adanya penyempurnaan sistem perencanaan dan penganggaran nasional, baik pada aspek proses dan mekanisme maupun tahap pelaksanaan musyawarah perencanaan ditingkat pusat dan daerah. Sehubungan dengan itu, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri tengah menyusun agenda dan langkah-langkah penyempurnaan yang bertahap dan terfokus.

Proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) mengacu kepada undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1181/M.PPN/02/2006 dan 050/244/SJ tanggal 14 Februari 2006 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrembang. Kemudian Surat Edaran Menteri dalam Negeri No.640/752/SJ Tanggal 12 Maret 2009 tentang Sistematika Penulisan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2010.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, kebijakan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan. Penyusunan RKPD juga mengacu pada RKP Nasional, terutama pada mensinergiskan, mensinkronisasikan dan mengintegrasikan program dan kegiatan antara pembangunan nasional dengan pembangunan daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jambi Tahun 2006 – 2010 berlandaskan pada Peraturan Gubernur Jambi Nomor : 9 Tahun 2006, Berita Daerah Provinsi Jambi tahun 2006 Nomor : 9 memuat Visi, Misi dan Arah Kebijakan yang merupakan acuan dalam pelaksanaan pembangunan daerah tahun 2006-2010.

Sesuai pasal 5 Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, disusun Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Provinsi Jambi yang menjabarkan visi, misi dan program Gubernur dan Wakil Gubernur ditempyh melalui Strategis Pokok yang dijabarkan dalam Agenda Pembangunan Daerah Provinsi Jambi yang memuat sasaran-sasaran pokok yang harus dicapai, arah kebijakan dan program-program pembangunan. Berdasarkan permasalahan, tantangan, serta keterbatasan yang dihadapi Provinsi Jambi, ditetapkan visi pembangunan tahun 2006-2010, yaitu **JAMBI MAMPU, MAJU DAN MANDIRI**.

Berdasarkan visi pembangunan Provinsi Jambi tersebut ditetapkan 5 (lima) Misi Pembangunan Provinsi Jambi tahun 2006-2010, sebagai berikut:

1. Peningkatan kesejahteraan dan kualitas masyarakat
2. Peningkatan daya saing dan kemandirian daerah
3. Peningkatan pembangunan prasarana dan sarana
4. Peningkatan kualitas pelayanan publik
5. Peningkatan Perlindungan masyarakat

Berdasarkan visi dan misi pembangunan di atas ditetapkan beberapa strategi dasar pembangunan Provinsi Jambi yang dibagi menjadi 3 (tiga) prioritas, yaitu :

1. Pemerintah yang berwibawa dan bersih dari KKN
2. Sumber daya manusia sebagai penggerak pembangunan, dan
3. Potensi sumberdaya alam daerah yang siap untuk digali dalam mengakselerasikan roda pembangunan.

Dalam rangka mencapai visi pembangunan Provinsi Jambi tahun 2010, memprioritaskan pada 4 (empat) agenda pembangunan, yaitu:

1. Meningkatkan daya saing ekonomi
2. Meningkatkan kemampuan dan pemerataan pembangunan daerah,
3. Meningkatkan kesejahteraan dan kehidupan masyarakat yang berkualitas dan,
4. Meningkatkan Pembangunan Hukum dan Tata Pemerintahan yang baik

Dalam perkembangan dinamika internal dan lingkungan nasional dan global, maka yang menjadi prioritas pembangunan pada tahun 2008 adalah sebagai berikut :

1. Revitalisasi Pertanian, Perikanan, Kehutanan (RPPK) dan UKM
2. Peningkatan infrastruktur wialyah
3. Pembangunan sumberdaya manusia
4. Pengelolaan sumberdaya alam dan Pariwisata

1.4. SISTIMATIKA RKPD

- **Bab Pendahuluan**

Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD, Renstra SKPD, Renja SKPD serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

Bab ini juga menjelaskan tentang landasan hukum serta maksud dan tujuan.

- **Bab Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu**

Mengemukakan tentang status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah berdasarkan indikator-indikator makro pembangunan daerah.

- **Bab Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah Beserta Kerangka Pendanaan**

Memuat penjelasan tentang rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan mencakup kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, tantangan dan prospek perekonomian daerah, arah kebijakan ekonomi daerah, analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah dan arah kebijakan keuangan daerah.

- **Bab Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2010**

Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi isu dan masalah mendesak pembangunan daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan dan hasil musrenbang RKPD Tahun 2010, dalam rangka menetapkan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2010.

- **Bab Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah**

Pada Bab ini dijelaskan mengenai perencanaan program dan kegiatan, indikator kinerja, target, satuan, pagu indikatif, lokasi, SKPD penanggungjawab dan keterkaitannya dengan prioritas dan sasaran pembangunan yang ditetapkan, yang dirangkum dari usulan rencana program dan kegiatan prioritas daerah SKPD ke dalam tabel

rekapitulasi rencana program dan kegiatan prioritas daerah tahun 2010.

- **Bab Penutup**

Uraian pada Bab penutup disesuaikan dengan kebutuhan.

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pencapaian Kinerja Indikator Pembangunan Daerah

Perkembangan PDRB per kapita berdasarkan harga berlaku mengalami peningkatan, dari Rp 5,62 juta tahun 2002 menjadi Rp 10,81 juta tahun 2007 atau mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 13,98 persen pertahun. Demikian juga perkembangan PDRB per kapita menurut harga konstan tahun 2001 mengalami peningkatan dari Rp 4,36 juta tahun 2002 menjadi Rp 5,20 juta tahun 2007 atau tumbuh rata-rata sebesar 3,58 persen pertahun, hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi riil Provinsi Jambi naik cukup signifikan selama lima tahun terakhir, walaupun PDRB per kapita tersebut tergolong rendah dibandingkan PDRB perkapita beberapa Provinsi lain di Sumatera.

Peningkatan PDRB Perkapita ini telah mendorong peningkatan pengeluaran konsumsi rumah tangga dari 62,97 persen tahun 2002 meningkat menjadi 65,3 persen tahun 2007. Pengeluaran konsumsi rumah tangga untuk makanan pada tahun 2002 sebesar 46,53 persen menurun menjadi 43,02 persen tahun 2007, sedangkan bukan makanan meningkat dari 16,44 persen tahun 2002 menjadi 22,28 persen tahun 2007. Dengan demikian peningkatan PDRB perkapita telah mendorong peningkatan daya beli masyarakat yang padagilirannya meningkatkan permintaan terhadap barang-barang konsumsi rumah tangga non makanan. Peningkatan permintaan ini akan mendorong pertumbuhan produksi terutama industri yang menghasilkan produk rumah tangga, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi yang digambarkan oleh laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan (tahun 2000), pada tahun 2007 meningkat sebesar 6,82 persen bila dibandingkan dengan tahun 2006. Peningkatan ini terjadi pada semua sektor perekonomian.

Sektor pertanian, perkebunan, kehutanan dan perikanan pada tahun 2007 mengalami kenaikan sebesar 9,98 persen. Pertumbuhan sektor ini meningkat tajam dibandingkan dengan tahun 2006 yang hanya tumbuh sebesar 5,9 persen. Pertumbuhan yang relative besar di sector pertanian adalah di subsektor perkebunan, subsektor tanaman bahan makanan dan subsektor perikanan masing-masing tumbuh diatas 7 persen.

Sektor pertambangan dan penggalian pada tahun 2007 mengalami pertumbuhan negatif sebesar -3,73 persen. Penurunan pertumbuhan di sektor pertambangan dan penggalian ini disebabkan mulai menurunnya

produksi migas disamping menurunnya harga minyak mentah dipasar dunia juga ikut mempengaruhi nilai dari sektor ini. Namun sub sektor pertambangan tanpa migas seperti batu bara yang terdapat di 4 kabupaten yaitu Bungo, Tebo, Sarolangun dan Batanghari mengalami pertumbuhan yang positif. Sebaliknya terjadi pada sub sektor penggalian yang mengalami perlambatan dari 5,6 persen menjadi 3,4 persen pada tahun 2007

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas pada tabel berikut dapat dilihat pemcapaian kinerja pembangunan daerah sebagai berikut:

Tabel 2.1. Pencapaian Indikator Makro Pembangunan Daerah Provinsi Jambi

| No | Indikator | Realisasi Tahun 2007 | Target Tahun 2008 | Realisasi Tahun 2008 | Tingkat Pencapaian Terhadap RPJMD |
|-----|---|----------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Pertumbuhan PDRB | 6,82 | 7,25 | 7,16 | |
| 2 | Laju inflasi Provinsi Jambi | 7,44 | 6,75 | 11,57 | |
| 3 | PDRB berlaku (Milyar Rp) | 32.077 | 42.065 | 41.089 | |
| 4 | PDRB konstan (Milyar Rp) | 14.275 | 15.587 | 15.297 | |
| 5 | PDRB per kapita | 10,81 | | 1 | |
| 6 | Indeks gini | | | | |
| 7 | Pemerataan pendapatan | | | | |
| 8 | Indeks ketimpangan regional | | | | |
| 9 | Jumlah penduduk (jiwa) | 2.781.927 | | 2.832.836 | |
| 10 | Jumlah penduduk (KK) | 668.324 | | | |
| 11 | Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan | 10,27 | | | |
| 12 | Laju pertumbuhan penduduk/ LPP (%) | 3,89 | | 1,83 | |
| 13 | Angka partisipasi murni (APM) | | | | |
| | a. SD | 93,24 | | 95,00 | |
| | b. SMP | | | | |
| | c. SMU | | | | |
| 14 | Angka partisipasi kasar (APK) | | | | |
| | a. SD | | | | |
| | b. SMP | 92,97 | | 95,09 | |
| | c. SMU | 61,13 | | 64,13 | |
| 15 | Angka melek huruf | 96,00 | | | |
| 16 | Angka rata-rata lama sekolah | 7,63 | | | |
| 17 | Angka kelangsungan hidup bayi | | | | |
| 18 | Angka usia harapan hidup | 69,00 | | 69,00 | |
| 19 | Jumlah penyandang cacat | | | | |
| 20 | Persentase jumlah tenaga kerja di bawah umur | | | | |
| 21 | Persentase jumlah perempuan di lembaga pemerintah | 33,98 | | | |
| 22 | Angka partisipasi angkatan kerja | 65,18 | | 65,06 | |
| 23 | Tingkat pengangguran terbuka | 6,22 | | 5,91 | |

Tabel diatas menunjukkan bahwa Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi terjadi peningkatan dari 5,89 persen tahun 2006 menjadi 6,82 persen tahun 2007 atau meningkat 0,93 persen. Peningkatan ini terutama didorong oleh sektor Industri Pengolahan mengalami kenaikan yaitu sebesar 5,45 persen. Sektor listrik, gas dan air bersih meningkat sebesar 6,69 persen,

sementara sektor bangunan tumbuh sebesar 14,58 persen pada tahun 2007. Pertumbuhan yang cukup signifikan terjadi pada keuangan, persewaan dan jasa perusahaan sebesar 19,06 persen, sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 7,14 persen, sektor perdagangan, hotel dan restoran yaitu sebesar 5,93 persen serta sektor jasa-jasa sebesar 5,62 persen. Pertumbuhan pada sektor sektor perdagangan, hotel dan restoran didukung oleh semua sub sektornya yaitu perdagangan, sub sektor hotel dan sub sektor restoran yang masing-masing tumbuh diatas 5 persen. Pada sektor pengangkutan dan komunikasi, sub sektor angkutan udara merupakan sub sektor dengan laju pertumbuhan tertinggi diantara semua sub sektor yang ada. Hal ini disebabkan maraknya maskapai-maskapai penerbangan yang membuka jalur penerbangan Jambi-Jakarta yang mengakibatkan persaingan tarif dan mampu mendorong laju pertumbuhan sub sektor tersebut. Di lain pihak menjamurnya bisnis telekomunikasi yang ditandai dengan berdirinya counter penjualan pulsa dimana penggunaan telepon seluler di Provinsi Jambi yang terus meningkat, sehingga sub sektor jasa penunjang komunikasi mengalami laju pertumbuhan yang cukup tinggi. Disisi lain tingginya pertumbuhan di sektor keuangan, persewaan dan jasa-jasa perusahaan yang mencapai 19,06 persen, terutama didorong oleh sektor perbankan dan sektor persewaan yang rata-rata tumbuh diatas 10 persen pada tahun 2007. Pertumbuhan sektor ini juga telah mendorong pertumbuhan sektor jasa-jasa sehingga dapat meningkat sebesar 5,62 persen.

Dilihat dari pola distribusi PDRB penggunaan, maka konsumsi rumah tangga masih merupakan penyumbang terbesar dalam PDRB penggunaan Provinsi Jambi yaitu sebesar 65,3 persen, pengeluaran konsumsi pemerintah sebesar 19,2 persen, pembentukan modal tetap bruto (PMTB) sebesar 13,8 persen, perubahan stok sebesar 2,6 persen, sedangkan pengeluaran konsumsi lembaga nir laba hanya sebesar 0,5 persen. Keadaan ini menunjukkan bahwa PDRB Provinsi Jambi sebagian besar atau 65,3 persen digunakan untuk pengeluaran konsumsi rumah tangga, jika ditotal dengan pengeluaran konsumsi pemerintah, maka total pengeluaran rumah tangga dan pemerintah mencapai 84,5 persen. Tingginya pengeluaran untuk konsumsi ini dapat mendorong tingkat inflasi, namun tingkat inflasi Provinsi Jambi tahun 2007 mengalami penurunan dari 10,66 persen tahun 2006 turun menjadi 7,44 persen tahun 2007.

Disamping itu kesempatan kerja tahun 2007 juga meningkat sebesar 0,17 persen, sehingga tingkat pengangguran berkurang 1,90 persen yaitu dari 78.264 orang tahun 2006 menurun menjadi 76.774 orang tahun 2007. Kondisi ini mendorong meningkatnya PDRB perkapita dari Rp 9,71 juta tahun 2006 menjadi Rp 10,81 juta tahun 2007 atau tumbuh sebesar 11,33 persen.

Peningkatan PDRB perkapita ini pada gilirannya mendorong tumbuhnya permintaan dan tingkat konsumsi masyarakat.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun Lalu dan Realisasi RPJMD

Penyelenggaraan urusan wajib pemerintah daerah dibidang pendidikan ini dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Sesuai amanat Undang-undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1, maka Provinsi Jambi menetapkan pendidikan sebagai prioritas pembangunan. Dalam agenda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jambi Tahun 2006 – 2010, juga telah dimuat tentang prioritas pendidikan tersebut. Dalam upaya untuk memajukan pendidikan ini, maka pemerintah juga telah melakukan berbagai program dan kegiatan.

Dalam kaitannya dengan pengembangan UKM Koperasi dalam otonomi daerah, diatur sebagai suatu kewajiban kepala pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, seperti yang ditegaskan dalam UU No. 32 Tahun 2004. Secara lengkap disebutkan bahwa dalam upaya meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat, Kepala Daerah berkewajiban mewujudkan demokrasi ekonomi dengan melaksanakan pembinaan dan pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah, yang mencakup permodalan, pemasaran, pengembangan teknologi, produksi, dan pengolahan serta pembinaan dan pengembangan sumberdaya manusia.

Tabel 2.2. Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu Provinsi Jambi

| No | Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Capaian Program/ Keluaran Kegiatan | Target Kinerja Capaian Program dan Keluaran Kegiatan | Target Kinerja Capaian Program dan Keluaran Kegiatan (RKPD 2008) | Realisasi Target Kinerja Capaian Program dan Keluaran Kegiatan (RKPD 2008) | Tingkat Realisasi Terhadap Target Capaian Program dan Keluaran Kegiatan (%) | Target Kinerja Capaian Program dan Keluaran Kegiatan (RKPD 2009) | Perkiraan Target Capaian Program (RPJMD) sampai dengan tahun 2009 | Perkiraan Target Capaian Program (RPJMD) sampai dengan Tahun 2009 (%) | SKPD Penanggung Jawab |
|-----|--|--|--|--|--|---|--|---|---|-----------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| | Urusan Wajib | | | | | | | | | |
| | Bidang Pendidikan | | | | | | | | | |
| | Program ... | | | | | | | | | |
| | Kegiatan ... | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

....., 2009.....

2.3. Isu Strategis dan Masalah Mendesak

Pada akhir tahun 2008 dan memasuki awal tahun 2009 ini, telah terjadi krisis keuangan global yang bermula dari krisis keuangan di Amerika Serikat, telah berdampak pada ekonomi nasional dan daerah. Ekonomi masyarakat belum pulih benar akibat kenaikan harga BBM pada awal tahun 2008 ini, yang mencapai 30-80%. Sektor riil juga baru mulai bangkit sehingga dapat mendorong penciptaan lapangan kerja baru. Namun krisis keuangan global telah menciptakan satu siklus mata rantai ekonomi yang berdampak juga pada sektor pertanian dan perkebunan yang menjadi tulang punggung ekonomi (*back bone*) masyarakat terutama di Provinsi Jambi. Hal ini ditandai dengan penurunan harga TBS dan harga karet Bokar. Padahal kedua komoditas unggulan ini menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat Provinsi Jambi. Akibatnya daya beli masyarakat menurun dan krisis ekonomi mulai muncul kembali baik diperdesaan maupun perkotaan di Provinsi Jambi.

Melemahnya permintaan terhadap komoditi-komoditi primer seperti CPO, Crumb rubber, kakao dan komoditi primer lainnya, telah menyebabkan penurunan harga-harga hasil-hasil perkebunan seperti Tandan buah sawit (TBS) dan Karet. Penurunan harga-harga telah mempengaruhi tingkat pendapatan dan daya beli masyarakat. Disisi lain faktor pengungkit untuk mendorong peningkatan ekonomi masyarakat belum tumbuh, karena masih rendahnya tingkat investasi baik dari pemerintah maupun swasta.

Rendahnya tingkat investasi dan menurunnya tingkat permintaan dari komoditi perkebunan tersebut, menyebabkan sebagian tenaga kerja telah ada yang di PHK atau di rumahkan, sehingga perluasan kesempatan kerja dan tingkat pengangguran menjadi isu strategis kedepan di khususnya di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kenaikan BBM beberapa waktu yang lalu telah berkontribusi terhadap peningkatan biaya transportasi yang pada akhirnya menjadi beban ekonomi masyarakat. Pengaruh dari kenaikan harga BBM dan krisis keuangan global yang mulai terjadi pada akhirnya akan berdampak pada kemiskinan dan meningkatnya masalah-masalah sosial. Dengan demikian masalah kemiskinan menjadi isu yang strategis untuk diperhatikan sebagai dampak dari krisis tersebut baik sekarang maupun dimasa datang. Implikasi

kemiskinan akan mempengaruhi derajat kesehatan dan kemampuan masyarakat untuk mengikuti pendidikan dasar.

Oleh karena kemampuan ekonomi masyarakat menurun akibat krisis yang akan masih berlangsung tersebut maka masalah gizi dan sanitasi lingkungan yang buruk akan berdampak terhadap turunnya derajat kesehatan masyarakat dan sebaliknya akan meningkat kasus-kasus gizi buruk dan daya tahan kesehatan masyarakat terhadap penyakit. Disamping itu kemiskinan juga akan menurunkan kemampuan masyarakat wajib belajar guna memenuhi standar minimal pendidikan dasar.

Keterbatasan sumber pembiayaan pembangunan dan telah berakibat kurangnya dana pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur fisik dasar. Akibatnya infrastruktur fisik dasar seperti jalan raya telah menunjukkan penurunan kualitas sehingga mengganggu percepatan aktivitas ekonomi dan pengembangan wilayah. Kebutuhan akan infrastruktur dasar yang baik dan berlanjut kualitas maupun kuantitasnya untuk saat sekarang dan masa datang masih tinggi.

Pemanfaatan sumberdaya alam yang berlebihan telah berdampak rusaknya lingkungan hidup. Disamping itu eksploitasi sumberdaya alam yang tidak memperhatikan lingkungan hidup juga telah merusak tatanan ekonomi karena bersifat eksploratif sehingga nilai tambah yang dihasilkan minimal dan hanya dapat dinikmati dalam waktu yang terbatas. Disamping itu biaya pemulihan sumber daya alam akibat kerusakan tersebut dan perubahan perilaku masyarakat membutuhkan biaya dan waktu yang cukup lama.

Tabel 2.3. Identifikasi Keterkaitan Isu dan Masalah Mendesak Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2010

| No | Keterkaitan Isu dan Masalah Mendesak | | |
|-----|---|--|--|
| | Nasional | Provinsi | Kab/Kota |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Krisis keuangan global menyebabkan penurunan permintaan terhadap produk ekspor. | Penurunan harga komoditi ekspor Jambi seperti CPO, Crumb rubber yang menyebabkan harga TBS dan karet turun tajam. | Penurunan pendapatan petani perkebunan sawit maupun karet. |
| 2. | Investasi asing pada saat krisis global ini akan sulit masuk, sementara investasi swasta nasional masih relatif rendah. | Investasi pemerintah baik melalui APBD maupun APBN menjadi faktor yang sangat penting untuk mendorong ekonomi. Sumber PAD yang terbatas. | Ketergantungan APBD II terhadap pembiayaan dari pusat sangat tinggi rata-rata diatas 90%. Sumber PAD yang terbatas |
| 3. | Rendahnya investasi menyebabkan rendahnya tingkat kesempatan kerja. | Tingkat pengangguran cenderung meningkat. | PHK dan peningkatan pengangguran. |
| 4. | Daya beli masyarakat menurun terutama dari masyarakat pertanian. | Penurunan pendapatan petani dan penurunan permintaan dan daya beli masyarakat. | Peningkatan kemiskinan karena penurunan pendapatan petani. |
| 5. | Banyak infrastruktur dasar belum dapat dipenuhi dengan baik | Infrastruktur jalan sangat jelek, kurang pasokan listrik dan air minum. | Infrastruktur jalan sangat jelek, kurang pasokan listrik dan air minum. |
| 6. | Pelayanan kesehatan pada semua lapisan masyarakat. | Pelayanan kesehatan yg prima dan terjangkau untuk masyarakat miskin | Pelayanan kesehatan yg prima dan terjangkau untuk masyarakat miskin |
| 7. | Pelayanan pendidikan yang merata dan terjangkau | Pelayanan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau, alokasi anggaran biaya pendidikan. | Tingkat pendidikan yang berkualitas dan terjangkau pada semua strata pendidikan. |

BAB III

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA KERANGKA PENDANAAN

3.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2008 dan Perkiraan Tahun 2009

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikator dari dampak kebijaksanaan pembangunan yang dilaksanakan khususnya dalam bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan kontribusi dari pertumbuhan berbagai macam sektor ekonomi, yang secara tidak langsung menggambarkan tingkat perubahan ekonomi yang terjadi. Bagi daerah, indikator ini penting untuk mengetahui keberhasilan pembangunan yang telah dicapai dan berguna untuk menentukan arah pembangunannya dimasa yang akan datang.

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi tahun 2008 sebesar 7,16 persen meningkat sebesar 0,34 persen dari 6,82 persen tahun 2007. Namun dipenghujung tahun 2008 telah terjadi krisis ekonomi yang dipicu bangkrutnya lembaga keuangan Amerika Serikat akibat macetnya kredit perumahan yang kemudian diikuti lembaga-lembaga keuangan di negara Eropa, menyebabkan guncangan hebat pasar uang hampir di seluruh kawasan dunia, termasuk Indonesia.

Dampak terberat krisis finansial global ini diperkirakan akan terjadi ditahun 2009 ini dan 2010 nanti. Segala upaya dari sisi moneter dan fiskal nasional sudah mulai dikerahkan untuk meminimalkan dampak krisis terhadap ketahanan ekonomi nasional. Demikian juga untuk perekonomian daerah APBD 2009, bersama konsumsi masyarakat, bahkan sangat diharapkan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi tahun 2009 ini, sehingga keberhasilan pelaksanaan APBD itu akan menjadi taruhan yang amat besar bagi pemerintah daerah, karena sumber pertumbuhan dari ekspor dan investasi akan sangat sulit diharapkan.

Krisis ini diharapkan dapat menjadi momentum Untuk menyelamatkan beberapa komoditas perkebunan, pertanian dan sektor perikanan dan peternakan, pemerintah Provinsi Jambi bersama sektor swasta dan masyarakat harus berupaya bersama dalam program penciptaan nilai tambah dan rantai nilai melalui pengembangan industri

turunan dari berbagai komoditas perkebunan serta mengurangi ketergantungan ekonomi Jambi pada produk dari luar (impor) dan juga daerah lain.

Oleh karena itu melalui pelaksanaan pembangunan tahun terakhir pelaksanaan RPJMD tahun 2005-2010, diharapkan dapat memberikan kemajuan penting, yang di implementasikan dalam agenda pembangunan yaitu: Meningkatkan Daya Saing Ekonomi; Meningkatkan Pembangunan dan Pemerataan Pembangunan Daerah; Meningkatkan Kesejahteraan dan Kehidupan Masyarakat yang Berkualitas; Meningkatkan Pembangunan Hukum dan Tata Pemerintah yang Baik.

Tabel 3.1. Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Provinsi Jambi

| No | Indikator Makro Ekonomi | Realisasi | | Proyeksi | |
|-----|---|------------------|------------------|------------|------------|
| | | Tahun 2007 | Tahun 2008 | Tahun 2009 | Tahun 2010 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | PDRB Harga Berlaku (Rp Miliar) PDRB Harga Konstan (Rp Miliar) | 32.077 14.275 | 41.089 15.297 | | |
| 2 | Tingkat Pertumbuhan Ekonomi / PDRB Harga Konstan tahun tertentu | | | | |
| 3 | Tingkat Inflasi | 7,44 | 13,25 | | |
| 4 | Struktur PDRB Pendekatan Produksi atau Sektoral | | | | |
| 5 | Produktivitas Sektoral, yang merupakan rasio antara Nilai Tambah Bruto (NTB) setiap sektor terhadap Jumlah tenaga kerja di sektor yang bersangkutan | | | | |
| 6 | Struktur PDRB Pendekatan Pengeluaran (Konsumsi Rumah Tangga, Konsumsi Pemerintah, Investasi, dan Kegiatan Perdagangan Luar Negeri) | | | | |
| 7 | Besaran ICOR (Incremental Capital Output Ratio) | | | | |
| 8 | Jumlah Penduduk Miskin | 281.900 | | | |
| 9 | Tingkat Pengangguran | 6,22 | 5,91 | | |
| 10 | Disparitas Pendapatan Regional yang dilihat dari perbedaan : | | | | |
| | - Pendapatan Perkapita - Kemampuan Investasi - Besaran Indeks Gini (<i>Gini Ratio Index</i>) - Besaran IPM (Indeks Pembangunan Manusia) | 71,46 | | | |
| 11 | Berbagai macam besaran rasio dan perbandingan-perbandingan | | | | |
| | - Pajak Daerah terhadap PDRB - Biaya pendidikan, kesehatan, penelitian dsb terhadap PDRB - Perbandingan Penerimaan Pemerintah Daerah (PAD dan Dana Perimbangan terhadap PDRB) - Struktur Pembiayaan Pembangunan Daerah - dan sebagainya | | | | |
| 12 | Dan seterusnya | | | | |

3.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2010 dan Tahun 2011

Gambaran ekonomi Jambi tahun 2009-2011 akan dipengaruhi perkembangan lingkungan eksternal sebagai berikut, **Pertama**, perkembangan globalisasi yang semakin meningkatkan integrasi perekonomian regional seperti menyatunya pasar Asia Tenggara yang terintegrasi dalam Asean Free Trade Area (AFTA). Keadaan ini disatu pihak akan menciptakan peluang yang lebih besar bagi perekonomian daerah seperti Jambi, tetapi dilain pihak juga menuntut daya saing perekonomian Jambi yang lebih tinggi. Dorongan eksternal bagi perekonomian Jambi antara lain berasal dari: a) perekonomian nasional terutama dari daerah di Pulau Jawa, Sumatera dan Batam yang diperkirakan masih tetap menjadi pasar bagi produk-produk pertanian, perkebunan dan kehutanan yang dihasilkan Jambi, b) perekonomian kawasan regional Asia Tenggara diperkirakan tetap menjadi kawasan pertumbuhan dan dinamis dengan motor penggerak perekonomian Singapura dan negara-negara yang tergabung dalam IMS-GT (Indonesia - Malaysia -Singapore Growth Triangle), karena sekitar 60 persen ekspor Jambi adalah ke Singapura, disamping itu secara geografis letak Jambi sangat strategis di kawasan IMS GT tersebut.

Kedua, dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI), maka perekonomian daerah seperti Jambi sangat tergantung pada perekonomian nasional, meskipun potensi timbulnya krisis ekonomi nasional menurun, namun potensi ketidakpastian eksternal tetap tinggi yang antara lain berasal dari kemungkinan melambatnya pertumbuhan ekonomi negara-negara industri paling maju seperti Amerika Serikat, Eropa dan Jepang, tingginya harga minyak bumi yang menyebabkan meningkatnya subsidi, menurunnya arus penanaman modal dan terpusatnya arus modal pada beberapa daerah maju.

Ketiga, penetapan standar produk dan regulasi dari negara maju yang cenderung tidak dapat dipenuhi oleh daerah-daerah yang baru berkembang seperti Jambi, sehingga hampir semua produk ekspor Jambi harus melalui Singapura untuk di kemas ulang, sehingga sebagian besar nilai tambah produk itu diterima Singapura bukan Jambi.

Adapun lingkungan internal yang diperkirakan berpengaruh positif terhadap perekonomian Jambi dalam tiga tahun mendatang adalah sebagai berikut:

Pertama, Jambi secara nasional termasuk daerah yang paling aman dan kondusif untuk berinvestasi, keadaan ini diharapkan dapat menjadi pendorong untuk masuknya investor ke Jambi. **Kedua**, sumberdaya alam yang berlimpah seperti minyak, gas, batubara, emas dan tersedianya lahan yang luas dapat dieksploitasi dengan baik dan berkelanjutan, sehingga dapat menjadi motor penggerak perekonomian Jambi kedepan.

Berbagai langkah kebijakan untuk meningkatkan investasi dan ekspor non-migas di berbagai sektor akan mendorong pertumbuhan ekonomi secara bertahap dari 6,62 persen tahun 2007 menjadi 8,52 persen tahun 2012, atau tumbuh dengan rata-rata 8,2 persen pertahun selama periode 2008-2012. Dengan pertumbuhan penduduk rata-rata 1,66 persen, pendapatan riil perkapita (dengan tahun dasar 2000) mencapai Rp 5,20 juta pada tahun 2007 dan pada tahun 2011 akan mencapai Rp 7,07 juta.

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi diprediksi masih didorong oleh investasi; konsumsi masyarakat; serta ekspor barang dan jasa. Pertumbuhan Investasi; ekspor barang dan jasa; serta konsumsi masyarakat diperkirakan rata-rata tumbuh sebesar 4,76 persen; 10,5 persen; dan 5,75 persen per tahun. Pertumbuhan konsumsi masyarakat pada tahun 2007 sebesar 6,1 persen, untuk tahun 2009-2011 pertumbuhan konsumsi masyarakat diperkirakan akan terus meningkat sejalan dengan peningkatan pendapatan masyarakat, sehingga permintaan konsumsi masyarakat diperkirakan terus meningkat.

Dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi diprediksi terutama didorong sektor industri pengolahan nonmigas yang diperkirakan tumbuh rata-rata 9,22 persen per tahun, di mana pendorong utamanya diharapkan dari industri hilir CPO, industri crumb rubber dan kelapa, industri barang kayu dan hasil hutan lainnya Sementara itu sektor pertanian dalam arti luas diperkirakan tumbuh rata-rata 6,38 persen per tahun, di mana pendorong utamanya adalah diharapkan dari subsektor perkebunan, tanaman bahan makanan, perikanan dan peternakan selama periode 2009-2011.

Pada tabel berikut dapat dilihat prediksi PDRB Provinsi Jambi berdasarkan harga konstan tahun 2000 untuk tahun 2009-2011. Total PDRB riil Provinsi Jambi diprediksi sebesar Rp 16.496 miliar pada tahun 2009 dan meningkat menjadi Rp 19.330 miliar pada tahun 2011 atau diprediksi tumbuh rata-rata sebesar 7,4 persen pertahun. Dari prediksi PDRB berdasarkan harga konstan tersebut, dapat diperoleh prediksi pertumbuhan ekonomi Jambi untuk tahun 2009-2011.

Tabel 3.1. Prediksi PDRB Provinsi Jambi Harga Konstan 2000 Tahun 2009-2011 (dalam Juta Rupiah)

| LAPANGAN USAHA | Realisasi | Realisasi* | Prediksi | | |
|------------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1. Pertanian | 4.224.534 | 4.476.316 | 4.762.801 | 5.076.193 | 5.413.760 |
| 2. Pertamb. & Penggalian | 1.800.800 | 1.934.599 | 2.080.081 | 2.239.208 | 2.409.163 |
| 3. Industri Pengolahan | 1.997.508 | 2.175.686 | 2.370.192 | 2.582.561 | 2.814.217 |
| 4. Listrik, Gas & Air Bersih | 108.621 | 115.844 | 123.560 | 134.643 | 147.488 |
| 5. Bangunan | 596.107 | 636.881 | 681.717 | 737.823 | 809.096 |
| 6. Perdag, Hotel & Restoran | 2.545.310 | 2.791.696 | 3.063.887 | 3.369.356 | 3.684.391 |
| 7. Pengang & Komunikasi | 1.175.324 | 1.282.867 | 1.404.611 | 1.541.560 | 1.699.108 |
| 8. Keu. Persew & Jasa Persh | 532.186 | 556.294 | 586.612 | 631.606 | 687.882 |
| 9. Jasa-Jasa | 1.267.816 | 1.332.602 | 1.422.552 | 1.535.076 | 1.665.865 |
| Pertumb.Ekonomi (%) | 6,82 | 7,16 | 7,20 | 7,60 | 7,80 |

Sumber: BPS Provinsi Jambi Hasil Analisis Ket *). Data Sementara

Pertumbuhan ekonomi untuk tahun 2009-2011 diprediksi akan terus meningkat, dimana pada tahun 2008 pertumbuhan ekonomi sebesar 7,16 persen yang didorong oleh pertumbuhan sektor industri pengolahan, bangunan, jasa-jasa, perdagangan dan sektor pertanian. Pada tahun 2009 pertumbuhan ekonomi diprediksi sebesar 7,0 - 7,2 persen yang didorong oleh sektor industri pengolahan, bangunan, perdagangan, hotel dan restoran, jasa-jasa dan sektor listrik gas dan air bersih, sektor-sektor ini diperkirakan akan tumbuh diatas 6,5 persen pada tahun 2009.

Tabel 3.2. Prediksi Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi Tahun 2009-2011

| LAPANGAN USAHA | PREDIKSI | | |
|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1. Pertanian | 5,40 | 5,58 | 5,65 |
| 2. Pertambangan & Penggalian | 7,52 | 7,65 | 7,59 |
| 3. Industri Pengolahan | 6,94 | 6,96 | 6,97 |
| 4. Listrik, Gas & Air Bersih | 6,66 | 8,97 | 9,54 |
| 5. Bangunan | 7,04 | 8,23 | 8,66 |
| 6. Perdag., Hotel & Restoran | 8,75 | 8,97 | 8,35 |
| 7. Pengangkutan & Komunikasi | 9,19 | 9,25 | 9,27 |
| 8. Keu. Persewaan & Jasa Persh | 5,45 | 7,67 | 7,91 |
| 9. Jasa-Jasa | 6,75 | 7,91 | 8,52 |
| Pertumbuhan Ekonomi (%) | 7,20 | 7,60 | 7,80 |

Sumber: Hasil Analisis

Selanjutnya pertumbuhan ekonomi pada tahun 2011 diprediksi sebesar 7,80 persen, sektor-sektor yang mendorong pertumbuhan ekonomi tersebut diperkirakan dari sektor industri pengolahan, listrik, gas dan air bersih, pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan dan jasa-jasa. Dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 7,80 persen pada tahun 2011 diperkirakan akan dapat mendorong pertumbuhan kesempatan kerja sebesar 2-3 persen pada tahun tersebut.

Struktur ekonomi Provinsi Jambi untuk tahun 2009-2011 diperkirakan akan terus bergeser kearah fundamental ekonomi yang semakin kuat. Peranan sektor pertanian diperkirakan akan terus menurun dari kontribusi 26,02 persen tahun 2008 menjadi 24,78 persen tahun 2011, demikian juga sektor pertambangan menurun dari 18,12 persen tahun 2008 menjadi 17,80 persen tahun 2011. Sedangkan sektor-sektor yang diperkirakan masih relatif stabil untuk tahun 2009-2011 adalah kontribusi sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan yaitu dari 3,80 persen tahun 2008 menjadi 3,70 persen tahun 2011. Hal ini disebabkan sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan belum berkembang dengan fundamental ekonomi yang dibangun dari sektor pertanian dan industri pengolahan, belum memberikan *multiplier effect* yang besar pada sektor tersebut.

Tabel. 3.3. Prediksi Struktur Ekonomi Provinsi Jambi 2008-2012

| LAPANGAN USAHA | PREDIKSI | | |
|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1. Pertanian | 25,82 | 25,36 | 24,78 |
| 2. Pertambangan & Penggalian | 18,10 | 18,11 | 17,80 |
| 3. Industri Pengolahan | 11,82 | 12,01 | 12,10 |
| 4. Listrik, Gas & Air Bersih | 0,83 | 0,88 | 0,90 |
| 5. Bangunan | 4,70 | 4,68 | 4,71 |
| 6. Perdag., Hotel & Restoran | 15,18 | 15,30 | 16,02 |
| 7. Pengangkutan & Komunikasi | 8,40 | 8,49 | 8,54 |
| 8. Keu. Persewaan & Jasa Persh | 3,78 | 3,77 | 3,70 |
| 9. Jasa-Jasa | 11,37 | 11,40 | 11,45 |
| Total (%) | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Sumber: Hasil Analisis (Data diolah)

Pertumbuhan ekonomi Jambi untuk tahun 2009-2011 diprediksi didorong oleh sektor industri pengolahan, pertanian, perdagangan, keuangan dan sektor pertambangan dan penggalian. Peranan industri pengolahan diperkirakan akan terus meningkat yang dilihat dari kontribusi sektoralnya dari 11,90 persen tahun 2007 menjadi 12,10 persen tahun 2011, peranan sektor bangunan juga meningkat dari 4,60 persen tahun 2007 menjadi 4,71 persen tahun 2011, sektor perdagangan, hotel dan restoran dari 15,10 persen tahun 2007 menjadi 16,10 persen tahun 2011. Disamping itu peranan sektor Listrik, gas, air bersih, pengangkutan dan komunikasi serta sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan diprediksi akan terus meningkat. Peningkatan sektor-sektor tersebut diperkirakan akan memperkuat struktur ekonomi Provinsi Jambi kedepan dengan berbasis pada sektor industri yang berbahan baku dari produk yang dihasilkan dari Provinsi Jambi seperti industri hilir yang berbasis komoditi perkebunan.

PREDIKSI PDRB PERKAPITA TAHUN 2009-2011

Prediksi PDRB per kapita menurut harga konstan tahun 2000 juga mengalami peningkatan, dari Rp 5,196 juta tahun 2007 diperkirakan akan terus meningkat mencapai Rp 6,613 juta tahun 2011 atau mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 6,24 persen pertahun untuk periode 2009-2011. Peningkatan PDRB perkapita ini akan dapat mendorong daya beli masyarakat, yang pada gilirannya dapat meningkatkan peningkatan konsumsi masyarakat. Peningkatan konsumsi masyarakat ini akan mendorong peningkatan permintaan terhadap kebutuhan masyarakat,

sehingga dapat menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat. Walaupun PDRB per kapita tersebut tergolong rendah dibandingkan PDRB perkapita beberapa Provinsi lain di Sumatera, namun diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah untuk 3 tahun kedepan.

Tabel 3.5. Prediksi PDRB Perkapita (Berdasarkan harga konstan) dan Penduduk Tahun 2000-2010.

| KETERANGAN | PREDIKSI | | |
|---------------------------|----------|-------|-------|
| | 2009 | 2010 | 2011 |
| PDRB Per Kapita (Rp Juta) | 5,836 | 6,208 | 6,613 |
| Pertumbuhan (%) | 6,00 | 6,36 | 6,53 |
| Jlh Penduduk (000 orang) | 2,826 | 2,875 | 2,923 |
| Pertumbuhan (%) | 1.84 | 1.73 | 1.67 |

Sumber: Data Diolah

Pada tabel diatas dapat dilihat pertumbuhan PDRB Perkapita berdasarkan harga konstan, walaupun nilainya relatif kecil, namun tingkat pertumbuhannya relatif baik yaitu rata-rata mencapai 6,24 persen pertahun untuk periode 2009-2011. Untuk pertumbuhan penduduk diperkirakan akan terus menurun yaitu dari pertumbuhan rata-rata 1,83 persen pertahun periode 2000-2006, maka pada tahun 2009 pertumbuhan penduduk diprediksi hanya sebesar 1,84 persen, sehingga secara rata-rata pertumbuhan penduduk selama tahun 2009-2011 hanya sebesar 1,70 persen pertahun. Pertumbuhan penduduk yang terus menurun ini diharapkan dapat menjadi moment untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat kedepan.

PREDIKSI PERTUMBUHAN PENDUDUK, TENAGA KERJA DAN KESEMPATAN KERJA TAHUN 2009-2011.

Proyeksi pertumbuhan penduduk Provinsi Jambi tahun 2009-2011 diperkirakan rata-rata mencapai 1,70 persen pertahun. Dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk selama tahun 2000-2006 yang mencapai 1,83 persen pertahun, maka proyeksi pertumbuhan penduduk tahun 2009-2011 diprediksi lebih rendah.

Demikian juga pertumbuhan angkatan kerja tahun 2009-2011 diperkirakan relatif rendah yaitu hanya 0,33 persen pertahun. Untuk menyalurkan angkatan kerja tersebut, maka kesempatan kerja harus

tumbuh diatas pertumbuhan angkatan kerja. Berdasarkan prediksi pertumbuhan ekonomi, dimana 3 tahun kedepan pertumbuhan ekonomi Jambi akan lebih banyak didorong oleh sektor produksi, maka dapat diperkirakan atau diprediksi pertumbuhan kesempatan kerja tahun 2009-2011 dapat mencapai 0,40 persen pertahun. Pertumbuhan angkatan kerja di Provinsi Jambi didorong oleh migrasi masih penduduk usia kerja yang berasal dari Pulau Jawa, Provinsi Sumatera Barat dan Sumatera Utara.

Tabel 3.4 Proyeksi Penduduk, Tenaga Kerja dan Tingkat Pengangguran Provinsi Jambi Tahun 2006-2011

| NO | KETERANGAN | PREDIKSI | | |
|----|--|-----------|-----------|-----------|
| | | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1 | Jlh Penduduk (000 orang) | 2.826 | 2.875 | 2.923 |
| | Pertumbuhan (%) | 1,84 | 1,73 | 1,67 |
| 2 | Jlh Angkatan Kerja (orang) | 1.182.820 | 1.183.211 | 1.183.601 |
| 3 | Jlh Kesempatan Kerja (Orang) | 1.109.302 | 1.111.485 | 1.113.699 |
| 4 | Tingkat Pengangguran (Orang) | 73.518 | 71.726 | 69.902 |
| | Pertumbuhan (%) | -2,24 | -2,44 | -2,54 |
| 5 | %tase Pengangguran dari Angkatan kerja (%) | 6,22 | 6,06 | 5,91 |

Sumber: Hasil Analisis

Untuk meningkatkan pertumbuhan kesempatan kerja serta meningkatkan pendapatan masyarakat, maka pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas harus menjadi prasyarat untuk tercapai tujuan diatas. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tersebut diharapkan dapat menurunkan tingkat pengangguran tenaga kerja dari 6,50 persen total angkatan kerja tahun 2007 menjadi 5,91 persen dari total angkatan kerja pada tahun 2011. Selama tahun 2009-2011 peningkatan penciptaan kesempatan kerja yang cukup besar diharapkan terjadi disektor industri pengolahan agribisnis, seperti industri hilir CPO, kelapa dan crumb rubber, sektor perdagangan, hotel dan restoran diharapkan dapat menyerap tenaga kerja 50.000-60.00 orang selama periode 2009-2011. Demikian juga untuk sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan dapat menciptakan lebih banyak kesempatan kerja pada masa mendatang. Sedangkan untuk sektor utilitas seperti listrik, gas dan air minum serta sektor transportasi, relatif kecil menyerap tenaga kerja. Sedangkan penyerapan tenaga kerja pada sub

sektor perkebunan diperkirakan relatif stabil, karena kebijakan di sektor perkebunan terutama tanaman karet adalah peningkatan produktivitas petani bukan perluasan lahan. Dengan strategi ini diharapkan pendapatan petani dan kesejahteraan meningkat.

Sejalan dengan prediksi menurunnya tingkat pengangguran serta dengan dilaksanakannya berbagai program mengatasi kemiskinan seperti bantuan langsung tunai (BLT) bersyarat dan program lainnya maka jumlah penduduk miskin diharapkan menurun secara drastis dari 11,35 persen tahun 2007 menjadi sekitar 7,2 persen tahun 2011.

3.3. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Reformasi yang berlangsung selama ini telah memberi perubahan yang lebih baik. Meskipun demikian masih menyisakan berbagai permasalahan mendasar yang menuntut perhatian khusus dalam pembangunan ke depan, diantaranya tingkat pendapatan penduduk dan kualitas sumberdaya manusia yang masih rendah, birokrasi pemerintahan daerah yang belum mampu mengikuti kaedah pemerintahan yang baik; pengelolaan sumberdaya alam yang belum optimal dan kurang mengindahkan asas-asas pembangunan yang berkelanjutan; nilai tambah produk masih rendah (produk primer); rendahnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur, dan masih tingginya tingkat ketergantungan pembiayaan pembangunan daerah, .

Berbagai permasalahan tersebut memberi pengaruh terhadap sistem pemerintahan daerah. Penanganan yang tidak sistemik terhadap permasalahan tersebut akan melahirkan persoalan baru yang berkembang dewasa ini baik di bidang ekonomi, sosial, politik, kelembagaan, maupun keamanan. Permasalahan mendasar ini perlu ditangani secara berkelanjutan dan komprehensif.

Dengan memperhatikan berbagai permasalahan tersebut, dalam rangka mewujudkan visi dan menjalankan misi arah kebijakan pembangunan Provinsi Jambi 2010-2011 yang disusun dalam kerangka 6 (enam) agenda pembangunan sebagai berikut:

1. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas:

- a. Pemantapan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah
- b. Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah,
- c. Peningkatan investasi dan ekspor nonmigas,
- d. Perbaikan Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup.
- e. Revitalisasi pertanian,
- f. Peningkatan daya saing agroindustri,

2. Mewujudkan sumberdaya manusia yang Berkualitas:

- a. Peningkatan tingkat dan kualitas pendidikan masyarakat,
- b. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat,
- c. Pembangunan Pemuda dan Olahraga,
- d. Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Kecil Berkualitas
- e. Peningkatan penguasaan dan pemanfaatan IPTEK.
- f. Peningkatan Kualitas Kehidupan dan Peran Perempuan Serta Kesejahteraan dan Perlindungan Anak.

3. Mewujudkan peningkatan kualitas dan jangkauan infrastruktur dasar :

- a. Percepatan pembangunan infrastruktur transportasi
- b. Percepatan pembangunan infrastruktur air dan perumahan
- c. Percepatan pembangunan infrastruktur Listrik
- d. Percepatan pembangunan infrastruktur Informasi dan telekomunikasi

4. Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja dan pemerataan pendapatan.

- a. Pengurangan Kemiskinan dan ketimpangan pendapatan antar golongan masyarakat,
- b. Peningkatan perlindungan dan kesejahteraan sosial,
- c. Peningkatan lapangan usaha dan Kesempatan kerja,
- d. Percepatan pembangunan perdesaan.

5. Mewujudkan tatanan sosial yang berakhlak mulia, tenteram dan demokratis melalui partisipasi dan pemberdayaan masyarakat.

- a. Pengembangan budaya demokrasi,
- b. Peningkatan Tramtibmas,
- c. Peningkatan kualitas kehidupan agama,
- d. Penegakan supremasi hukum dan HAM

6. Mewujudkan tatanan pemerintahan yang tertib, bersih dan mampu menjadi pelayan masyarakat.

- a. Peingkatan Perencanaan Pembangunan
- b. Peningkatan Layanan Kependudukan dan Catatan Sipil
- c. Peningkatan penggunaan Pertanahan
- d. Peningkatan Efektifitas dan efesiensi Pemerintahan Umum
- e. Peningkatan Kapasitas Kepegawaian
- f. Penyediaan Data Statistik
- g. Penataan Kearsipan
- h. Peningkatan tata laksana dan kelembagaan
- i. Peningkatan Kinerja SKPD

3.4. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Ada dua sumber pembiayaan yang memegang peranan penting dalam keuangan daerah di Provinsi Jambi; **Pertama**, sumber pembiayaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jambi, yang pelaksanaannya ditetapkan melalui peraturan daerah setiap tahunnya. **Kedua**, sumber pembiayaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang di dalamnya terakomodasi dana dekonsentrasi dan dana pinjaman luar negeri.

3.4.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

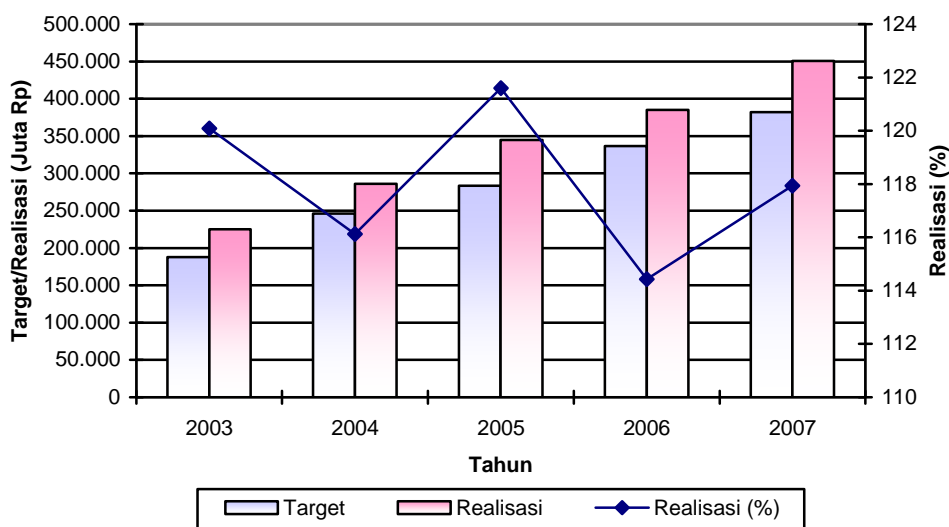
Penerimaan daerah yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jambi diperoleh dari berbagai sumber diantaranya berasal dari pendapatan asli daerah, berupa sisa lebih perhitungan anggaran tahun yang lalu, pajak dan retribusi daerah, bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak, dana perimbangan berupa dana alokasi umum dan penerimaan lain-lain yang sah. Dari semua penerimaan tersebut yang memberikan kontribusi yang cukup besar berasal dari instansi yang

lebih tinggi atau bantuan dari pemerintah pusat, sedangkan sumber penerimaan daerah yang berasal dari penerimaan sendiri (PDS) masih terlalu kecil dibandingkan dengan bantuan pusat. Hal ini menunjukkan bahwa, Provinsi Jambi selama ini dalam pembiayaan administrasi pemerintahan dan pembangunannya masih sangat tergantung dari pemerintah pusat, terutama untuk belanja pegawai berupa gaji, yang masih diharapkan dari pemerintah pusat.

Secara umum gambaran perkembangan dan realisasi pendapatan daerah Provinsi Jambi periode 1999/2000 - 2003, memperlihatkan peningkatan yang cukup signifikan, hal ini tercermin dari tabel 8.2 berikut ini.

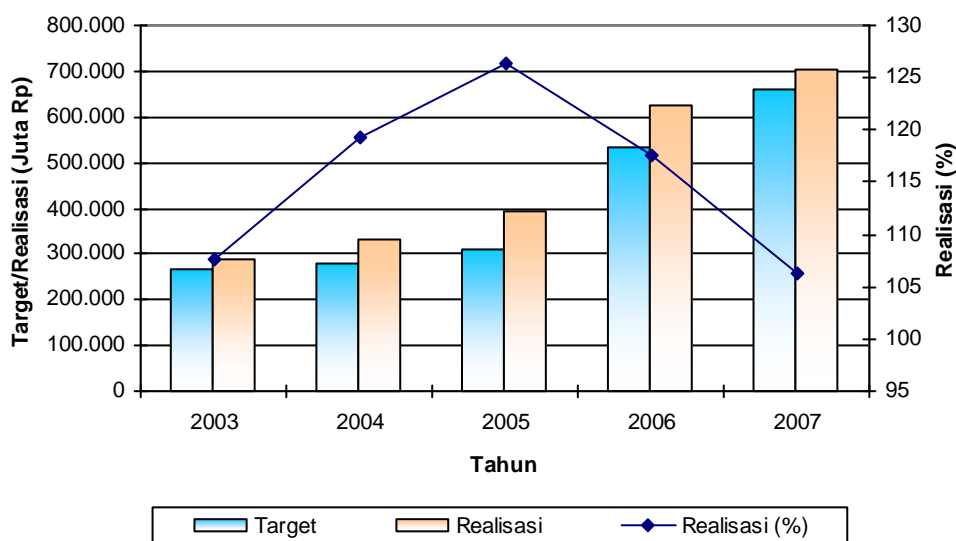
Tabel 8.2 . Target dan Realisasi Pendapatan Daerah, 2003 – 2007 (JutaRp)

| PENDAPATAN | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. Sisa Angg. Th.Lalu | | | | |
| Target | 95.019.443.884,64 | 126.821.826.426,00 | 168.995.139.059,00 | 278.917.465.882,00 |
| Realisasi | 95.019.443.884,64 | 126.821.826.426,00 | 168.995.139.059,00 | 278.917.465.882,00 |
| Realisasi (%) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. PAD | | | | |
| Target | 187.639.300.115,36 | 246.236.225.716,00 | 283.589.737.270,00 | 336.590.283.408,00 |
| Realisasi | 225.323.147.699,89 | 285.932.959.949,00 | 344.880.739.493,00 | 385.158.332.133,97 |
| Lebih (kurang) | 37.683.847.584,53 | 39.696.734.233,00 | 61.291.002.223,00 | 48.568.048.725,97 |
| Realisasi (%) | 120,08 | 116,12 | 121,6 | 114,43 |
| 3. Dana Perimbangan | | | | |
| Target | 266.403.018.000,00 | 279.894.258.746,00 | 311.479.747.859,00 | 532.035.039.025,00 |
| Realisasi | 287.144.584.953,00 | 333.981.288.630,55 | 393.688.551.719,08 | 625.108.331.584,00 |
| Lebih (kurang) | 20.741.566.953,00 | 54.087.029.884,55 | 82.208.803.860,08 | 93.073.292.559,00 |
| Realisasi (%) | 107,54 | 119,32 | 126,39 | 117,49 |
| 4. Penerimaan Lain | | | | |
| Target | 8.706.298.000,00 | 8.525.000.000,00 | 12.770.000.000,00 | 26.300.000.000,00 |
| Realisasi | 8.706.298.000,00 | 10.229.761.093,00 | 10.251.501.874,00 | 0 |
| Lebih (kurang) | - | 1.704.761.093 | (2.518.498.126,00) | (26.300.000.000) |
| Realisasi (%) | 100 | 120 | 80,28 | - |



Grafik 8.3. Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jambi Tahun 2003-2007

Pada sisi pendapatan daerah, yang terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, pendapatan asli daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah serta urusan kas dan perhitungan memperlihatkan realisasi yang meningkat dibandingkan dari target yang ditetapkan. Tabel 8.2 memperlihatkan sisa lebih anggaran tahun lalu selama tahun 1999/2000 – 2003 terealisasi sebesar 100 % dari target yang ada. Sementara itu untuk pendapatan asli daerah yang terdiri dari pajak dan retribusi daerah, laba hasil usaha dan pendapatan lainnya yang sah, peningkatan setiap tahunnya memperlihatkan realisasi yang melampaui target yang ditetapkan. Realisasi terbesar dialami pada tahun 2001 yaitu sebesar 135,79 % dan yang terkecil dialami pada tahun 1999/2000, yaitu sebesar 119,86 %, hal ini disebabkan oleh adanya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah.



Grafik 8.4. Target dan Realisasi Dana Perimbangan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2003-2007.

Selama periode yang sama, pendapatan dari dana perimbangan memperlihatkan peningkatan realisasi rata-rata sebesar 99,77 % setiap tahunnya. Realisasi yang terbesar dialami pada tahun 2003 yaitu sebesar 107,54 %, dan yang terkecil dialami pada tahun 1999/2000, sebesar 94,50 %. Sedangkan realisasi urusan kas dan perhitungan yang paling besar dialami pada tahun 2001 sebesar 125,70 % dan yang terkecil dialami pada tahun 2002 sebesar 70,89 %.

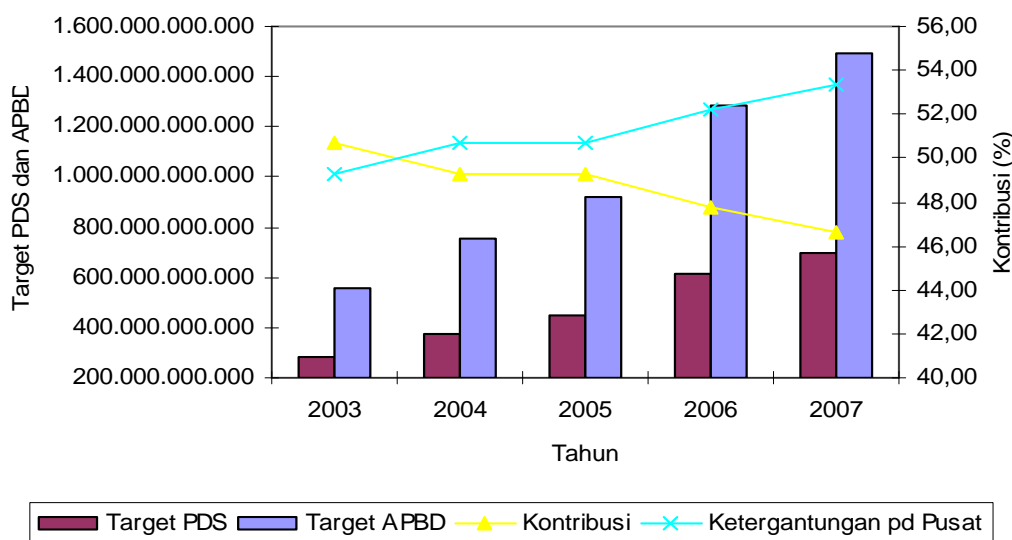
Kondisi diatas mengindikasikan bahwa, kontribusi Penerimaan Daerah Sendiri (PDS) yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sisa perhitungan anggaran tahun lalu. Dalam perkembangannya selama periode 1999/2000 – 2003, memberikan kontribusi yang terus meningkat secara positif, walaupun perkembangannya berfluktuasi meningkat setia tahunnya, akan tetapi masih kecil apabila dibandingkan dengan ketergantungan daerah ini terhadap pemerintah pusat, walaupun tingkat ketergantungan daerah ini terhadap pemerintah pusat setiap tahunnya mengalami penurunan secara presentase, akan tetapi secara nominal bantuan yang diterima pemerintah daerah Provinsi Jambi terus meningkat dalam jumlah yang cukup besar. Hal ini dapat dilihat dari perkembangannya sebagaimana tabel berikut ini ;

Tabel 8.3 Kontribusi Target Penerimaan Daerah Sendiri (PDS) dan Ketergantungan Terhadap Pemerintah Pusat Tahun 2003 – 2007

| Tahun | Target | | Persentase | |
|-----------|-----------------|-------------------|------------|-------|
| | Jumlah PDS | Total APBD | *K | *KP |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2003 | 282.658.744.000 | 557.768.060.000 | 50,68 | 49,32 |
| 2004 | 373.058.052.142 | 756.965.836.099 | 49,28 | 50,72 |
| 2005 | 452.584.876.329 | 917.815.932.145 | 49,31 | 50,69 |
| 2006 | 615.507.749.290 | 1.289.184.129.600 | 47,74 | 52,26 |
| 2007 | 694.659.116.691 | 1.490.415.889.824 | 46,61 | 53,39 |
| Rata-rata | | | 48,72 | 51,28 |

Sumber : APBD Provinsi Jambi beberapa tahun terbitan
 *K = kontribusi **KP = Ketergantungan Pusat

Grafik 8.5 Kontribusi Target Penerimaan Daerah Sendiri (PDS) dan Ketergantungan Terhadap Pemerintah Pusat 2003 – 2007



Tabel 8.3 dan Grafik 8.5 diatas mencerminkan bahwa dalam pembiayaan administrasi pemerintahan dan pembangunan yang terakomodasi dalam APBD Provinsi Jambi selama periode 1999/2000 - 2003, secara rata-rata 64,18 % diperoleh dari pemerintah pusat atau instansi yang lebih tinggi, sedangkan sisanya sebesar 35,83 % diperoleh dari pendapatan asli daerah sendiri. Pada periode tersebut, kontribusi yang cukup besar terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jambi dialami pada tahun 2003, yaitu sebesar Rp.282.658.744.000. dari total APBD Rp. 557.768.060.000. atau sekitar 50,68 % berasal dari

penerimaan daerah sendiri (PDS) dan sisanya sebesar 49,32 % berasal dari instansi yang lebih tinggi atau pemerintah pusat.

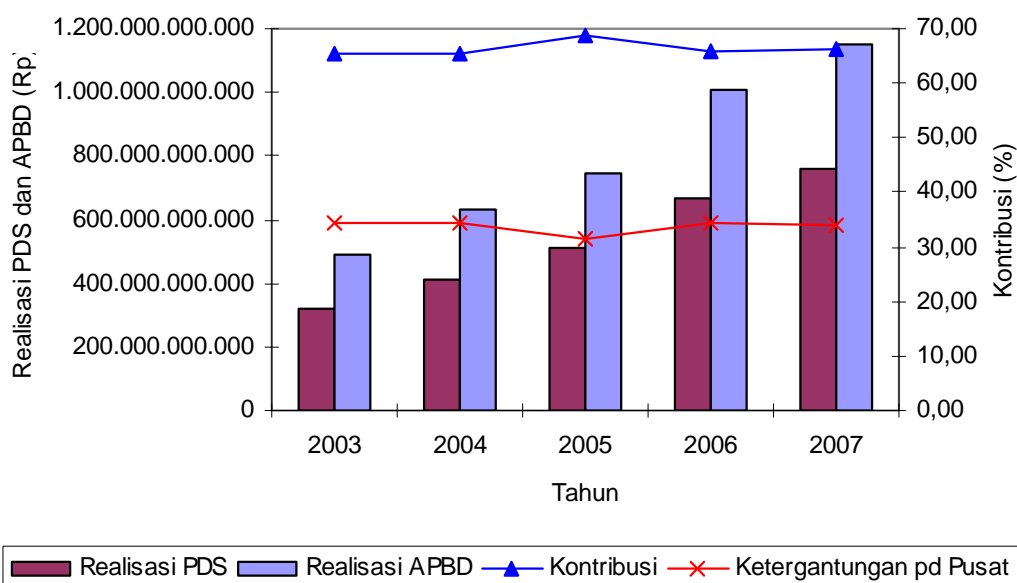
Sementara itu, dilihat dari realisasi penerimaan daerah, yang telah memberikan kontribusinya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jambi selama periode 2003 - 2007, menunjukkan peningkatan, begitu juga dengan ketergantungannya daerah ini terhadap pusat mengalami peningkatan seperti yang tercermin dalam berikut ;

Tabel 8.4 Kontribusi Realisasi Penerimaan Daerah Sendiri (PDS) dan Ketergantungan Terhadap Pemerintah Pusat Tahun 2003 – 2007.

| Tahun | Realisasi | | Persentase | |
|------------------|-----------------|-------------------|--------------|--------------|
| | PDS | APBD | *K | **KP |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2003 | 320.342.593.584 | 489.371.648.110 | 65,46 | 34,54 |
| 2004 | 412.754.786.375 | 630.144.009.673 | 65,50 | 34,50 |
| 2005 | 513.875.878.552 | 748.820.793.086 | 68,62 | 31,38 |
| 2006 | 664.075.798.016 | 1.010.266.663.718 | 65,73 | 34,27 |
| 2007 | 763.208.610.391 | 1.152.820.963.776 | 66,20 | 33,80 |
| Rata-rata | | | 66,30 | 33,70 |

Sumber : APBD Provinsi Jambi beberapa tahun terbitan

*K = kontribusi **KP = Ketergantungan Pusat



Grafik 8.6 Kontribusi Realisasi Penerimaan Daerah Sendiri (PDS) dan Ketergantungan Terhadap Pemerintah Pusat 2003 – 2007

Pada Tabel 8.4 dan Grafik 8.6 memperlihatkan bahwa, realisasi penerimaan daerah sendiri memberikan kontribusi rata-rata sebesar 48,90 % setiap Tahunannya, hal ini menyebabkan tingkat ketergantungan daerah ini terhadap pemerintah pusat sebesar 51,10 %. Realisasi yang cukup besar dialami daerah ini pada tahun 2003 yaitu sebesar 65,46 %, dan yang terkecil dialami pada tahun 1999/2000 yaitu 28 %. Kondisi ini mencerminkan bahwa sumber pembiayaan daerah ini masih mengharapkan dari pemerintah pusat, karena objek pajak yang ada di Provinsi sangat terbatas pendapatan daerah.

Tabel 3.2. Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2007 sampai Tahun 2011

| No | Jenis Pendapatan Daerah | Realisasi | | Proyeksi | | |
|-------|---|------------------------|------------------------|------------|------------|------------|
| | | Tahun 2007 | Tahun 2008 | Tahun 2009 | Tahun 2010 | Tahun 2011 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1.1 | Pendapatan asli daerah | 450.631.728.338 | 624.808.335.374 | | | |
| 1.1.1 | Pajak daerah | | 527.008.669.551 | | | |
| 1.1.2 | Retribusi daerah | | 27.282.991.499 | | | |
| 1.1.3 | Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan | | 6.285.839.774 | | | |
| 1.1.4 | Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah | | 64.230.834.550 | | | |
| 1.2 | Dana perimbangan | 677.171.191.000 | 745.860.901.379 | | | |
| 1.2.1 | Dana bagi hasil pajak/ bagi hasil bukan pajak | 262.153.191.000 | 252.603.219.379 | | | |
| 1.2.2 | Dana alokasi umum | 415.018.000.000 | 468.803.682.000 | | | |
| 1.2.3 | Dana alokasi khusus | - | 24.454.000.000 | | | |
| | | | | | | |
| 1.3 | Lain-lain pendapatan daerah yang sah | 25.018.043.993. | 64.410.339.889 | | | |
| 1.3.1 | Hibah | | | | | |
| 1.3.2 | Dana darurat | | | | | |
| 1.3.3 | Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya | | | | | |
| 1.3.4 | Dana penyesuaian dan otonomi khusus | | | | | |
| 1.3.5 | Bantuan keuangan dari pemerintah daerah lainnya | | | | | |

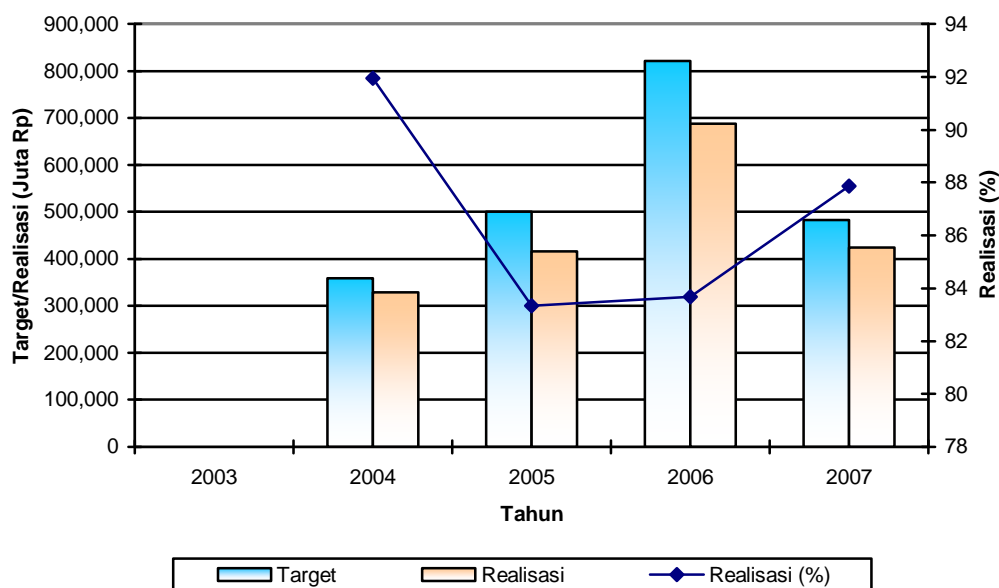
3.4.2. Arah Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Belanja pembangunan sebagai pelaksanaan kebijakan program pembangunan tahunan diklasifikasikan secara vertikal dalam susunan sektor dan sub sektor, program dan proyek yang terangkum dalam bidang-bidang pembangunan selama periode 2003-2007 meliputi duapuluh sektor dan subsidi kepada daerah bawahan. Selama periode tersebut target dan realisasi dari pengeluaran pembangunan mengalami peningkatan sebagaimana tabel berikut;

Tabel 8.13 Target dan Realisasi Belanja Pembangunan APBD Provinsi Jambi 2003 – 2007

| Tahun | Belanja Pelayanan Publik (Rp) | | % Realisasi | Pertumbuhan (%) | |
|-----------|-------------------------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------|
| | Target | Realisasi | | Target | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2003 | | | | | |
| 2004 | 358.303.787.066 | 329.434.287.474 | 91,94 | | |
| 2005 | 499.623.555.267 | 416.359.241.268 | 83,33 | | |
| 2006 | 821.824.644.453 | 687.743.938.240 | 83,69 | | |
| 2007 | 482.080.087.625 | 423.534.583.182 | 87,86 | | |
| Rata-rata | | | | | |

Sumber : APBD Provinsi Jambi beberapa tahun terbitan



Grafik 8.8. Target dan Realisasi Belanja Pembangunan APBD Provinsi 2003-2007.

Tabel 3.3. Realisasi dan Proyeksi Penerimaan Pembiayaan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2007 s.d Tahun 2011

| No | Jenis Pendapatan Daerah | Realisasi | | Proyeksi | | |
|--|--|------------------------|------------------------|------------|------------|------------|
| | | Tahun 2007 | Tahun 2008 | Tahun 2009 | Tahun 2010 | Tahun 2011 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 3.1.1 | Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA) | | | | | |
| 3.1.2 | Pencairan dana cadangan | | | | | |
| 3.1.3 | Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan | | | | | |
| 3.1.4 | Penerimaan pinjaman daerah | | | | | |
| 3.1.5 | Penerimaan kembali pemberian pinjaman | | | | | |
| 3.1.6 | Penerimaan piutang daerah | | | | | |
| Jumlah penerimaan pembiayaan Daerah | | 312.576.882.053 | 359.487.857.970 | | | |

3.4.3. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Tabel 3.4. Realisasi dan Proyeksi (Pagu Indikatif) Belanja Tidak Langsung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2007 s.d Tahun 2011

| No | Jenis Pendapatan Daerah | Realisasi | | Proyeksi | | |
|-------|--|--------------------------|-----------------|------------|------------|------------|
| | | Tahun 2007 | Tahun 2008 | Tahun 2009 | Tahun 2010 | Tahun 2011 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | | (Belanja Operasi) | | | | |
| 2.1.1 | Belanja pegawai | 256.948.091.384 | 294.901.265.317 | | | |
| 2.1.2 | Belanja bunga | - | - | | | |
| 2.1.3 | Belanja subsidi | - | 5.984.070.000 | | | |
| 2.1.4 | Belanja hibah | - | 3.592.607.000 | | | |
| 2.1.5 | Belanja bantuan sosial | 3.392.698.500 | 3.281.116.600 | | | |
| 2.1.6 | Belanja bagi hasil kepada Provinsi/ Kab/ Kota dan Pemerintahan Desa | - | 198.770.202.425 | | | |
| 2.1.7 | Belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/ Kab/Kota dan Pemerintahan Desa | 6.501.5000000000 | 3.250.000.000 | | | |
| 2.1.8 | Belanja tidak | - | 283.000.000 | | | |

| | | | | | | |
|--------------------------------------|----------------|------------------------|------------------------|--|--|--|
| | terduga | | | | | |
| 2.1.9 | Belanja Barang | 288.042.786.739 | | | | |
| Jumlah Belanja Tidak Langsung | | 554.885.076.623 | 510.062.261.342 | | | |

3.4.4. Arah Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Tabel 3.5. Realisasi dan Proyeksi (Pagu Indikatif) Pengeluaran Pembiayaan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2007 s.d Tahun 2011

| No | Jenis Pendapatan Daerah | Realisasi | | Proyeksi | | |
|---|-------------------------------------|----------------------|----------------------|------------|------------|------------|
| | | Tahun 2007 | Tahun 2008 | Tahun 2009 | Tahun 2010 | Tahun 2011 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 3.2.1 | Pembentukan dana cadangan | | | | | |
| 3.2.2 | Penyertaan modal (investasi) daerah | | | | | |
| 3.2.3 | Pembayaran pokok utang | | | | | |
| 3.2.4 | Pemberian pinjaman daerah | | | | | |
| Jumlah pengeluaran pembiayaan Daerah | | 1.000.000.000 | 5.000.000.000 | | | |

3.4.5. Rekapitulasi Realisasi dan Proyeksi (Pagu Indikatif) Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah

Tabel 3.6. Rekapitulasi Realisasi dan Proyeksi (Pagu Indikatif) Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2007 s.d Tahun 2011

| No | Jenis Pendapatan Daerah | Realisasi | | Proyeksi | |
|----------|---|------------------------|---------------------------|-----------------|------------|
| | | Tahun 2007 | Tahun 2008 | Tahun 2009 | Tahun 2010 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | PENDAPATAN DAERAH | | | | |
| 1.1 | Pendapatan asli daerah | 450.631.728.338 | 649.824.087.719,97 | | |
| 1.1.1 | Pajak daerah | | 527.008.669.551 | 423.795.726.000 | |
| 1.1.2 | Retribusi daerah | | 27.282.991.499 | 27.781.100.000 | |
| 1.1.3 | Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan | | 6.285.839.774 | | |
| 1.1.4 | Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah | | 64.230.834.550 | | |

| | | | | | |
|-------------|---|--------------------------|------------------------|-----------------|--|
| 1.2 | Dana perimbangan | 660.933.000.000 | 745.860.901.379 | 776.576.880.000 | |
| 1.2.1 | Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak | 262.153.191.000 | 252.603.219.379 | 267.950.000.000 | |
| 1.2.2 | Dana alokasi umum | 415.018.000.000 | 468.803.682.000 | 473.505.880.000 | |
| 1.2.3 | Dana alokasi khusus | - | 24.454.000.000 | 35.121.000.000 | |
| 1.3 | Lain-lain pendapatan daerah yang sah | 25.018.043.993 | 64.410.339.889 | | |
| 1.3.1 | Hibah | | | | |
| 1.3.2 | Dana darurat | | | | |
| 1.3.3 | Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya | | | | |
| 1.3.4 | Dana penyesuaian dan otonomi khusus | | | | |
| 1.3.5 | Bantuan keuangan dari pemerintah daerah lainnya | | | | |
| A | JUMLAH PENDAPATAN | | | | |
| 2 | BELANJA DAERAH | | | | |
| 2.1. | Belanja Tidak Langsung | (Belanja Operasi) | | | |
| 2.1.1 | Belanja pegawai | 256.948.091.384 | 294.901.265.317 | | |
| 2.1.2 | Belanja bunga | - | - | | |
| 2.1.3 | Belanja subsidi | - | 5.984.070.000 | | |
| 2.1.4 | Belanja hibah | - | 3.592.607.000 | | |
| 2.1.5 | Belanja bantuan sosial | 3.392.698.500 | 3.281.116.600 | | |
| 2.1.6 | Belanja bagi hasil kepada Provinsi/ Kab/ Kota dan Pemerintahan Desa | - | 198.770.202.425 | | |
| 2.1.7 | Belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/ | 6.501.500.000 | 3.250.000.000 | | |

| | | | | | |
|-------------|--|------------------------|------------------------|--|--|
| | Kab/ Kota dan Pemerintahan Desa | | | | |
| 2.1.8 | Belanja tidak terduga | - | 283.000.000 | | |
| 2.1.9 | Belanja Barang | 288.042.786.739 | | | |
| B | JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG | 554.885.076.623 | 510.062.261.342 | | |
| | | (Belanja Modal) | | | |
| 2.2. | Belanja Langsung | 423.534.583.182 | 893.259.407.613 | | |
| C | JUMLAH BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN KEGIATAN | | | | |
| D | TOTAL JUMLAH BELANJA (B + C) | | | | |
| E | Surplus/(Defisit) (A-D) | | | | |
| | | | | | |
| 3 | PEMBIAYAAN DAERAH | | | | |
| 3.1 | Penerimaan Pembiayaan | | | | |
| 3.1.1 | Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA) | | | | |
| 3.1.2 | Pencairan dana cadangan | | | | |
| 3.1.3 | Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan | | | | |
| 3.1.4 | Penerimaan pinjaman daerah | | | | |
| 3.1.5 | Penerimaan kembali pemberian pinjaman | | | | |
| 3.1.6 | Penerimaan piutang daerah | | | | |
| | JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN | 312.576.882.053 | 359.487.857.970 | | |

| | | | | | |
|------------|---|----------------------|----------------------|--|--|
| | | | | | |
| 3.2 | Pengeluaran Pembiayaan | | | | |
| 3.2.1 | Pembentukan dana cadangan | | | | |
| 3.2.2 | Penyertaan modal (investasi) daerah | | | | |
| 3.2.3 | Pembayaran pokok utang | | | | |
| 3.2.4 | Pemberian pinjaman daerah | | | | |
| G | JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN | 1.000.000.000 | 5.000.000.000 | | |
| H | Pembiayaan neto (F-G) | | | | |
| I | Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SiLPA) (H+E) | | | | |

BAB IV

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2010

AGENDA MENINGKATKAN DAYA SAING EKONOMI

Kondisi ekonomi makro Provinsi Jambi pada tahun 2008 telah memberikan fondasi yang relatif baik dalam mendorong pertumbuhan ekonomi pada tahun 2009 ini. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2008 sebesar 7,16%, diperkirakan akan dapat dipertahankan pada level 7,0%-7,2% pada tahun 2009 ini. Demikian juga pertumbuhan sektoral kelompok primer diperkirakan juga meningkat dari 9,65% tahun 2007 menjadi 9,76% tahun 2008. Pertumbuhan sektoral kelompok sekunder dan tersier diperkirakan juga meningkat masing-masing dari 6,18% dan 8,10% tahun 2007 menjadi 6,27% dan 8,31% tahun 2008.

Stabilitas ekonomi makro daerah yang relatif stabil pada tahun 2008 diperkirakan akan menjadi tetap stabil dan baik pada tahun 2010 selain itu, beberapa kejadian luar biasa seperti penyebaran virus flu burung, membutuhkan penanganan secara khusus.

Meningkatnya daya saing ekonomi daerah ini, dipengaruhi oleh perkembangan lingkungan eksternal antara lain, *pertama*, perkembangan globalisasi yang semakin meningkatkan integrasi perekonomian regional seperti menyatunya pasar Asia Tenggara yang terintegrasi dalam Asean Free Trade Area (AFTA). Keadaan ini disatu pihak akan menciptakan peluang yang lebih besar bagi perekonomian daerah seperti jambi, tetapi dilain pihak juga menuntut daya saing perekonomian jambi yang lebih tinggi. Dorongan eksternal bagi perekonomian jambi antara lain berasal dari: a) perekonomian nasional terutama dari daerah di pulau jawa, sumatera dan batam yang di perkirakan masih tetap menjadi pasar bagi produk-produk pertanian, perkebunan dan kehutanan yang dihasilkan jambi, b) perekonomian kawasan regional Asia Tenggara diperkirakan tetap menjadi kawasan pertumbuhan dan dinamis dengan motor penggerak perekonomian singapura dan negara-negara yang tergabung dalam IMS-GT (Indonesia – Malaysia-Singapore Growth Triangel), karena sekitar 60 persen ekspor jambi adalah ke singapura, disamping itu secara geografis letak jambi sangat strategis di kawasan IMS GT Tersebut.

Kedua, Perekonomian daerah Jambi sangat tergantung pada perekonomian nasional, meskipun potensi timbulnya krisis ekonomi nasional menurun, namun potensi ketidakpastian eksternal tetap tinggi yang menyebabkan meningkatnya subsidi, menurunnya arus penanaman modal dan terpusatnya arus modal pada beberapa daerah yang lebih maju dan yang memiliki fasilitas sarana dan prasarana yang lebih lengkap.

Sedangkan lingkungan internal yang diperkirakan berpengaruh positif terhadap perkembangan perekonomian Jambi antara lain: *Pertama*, Jambi secara nasional termasuk daerah yang paling aman dan kondusif untuk berinvestasi, keadaan ini diharapkan dapat menjadi pendorong untuk masuknya investor ke Jambi. *Kedua*, sumberdaya alam yang berlimpah seperti minyak, gas, batubara, emas dan tersedianya lahan yang luas dapat dieksploitasi dengan baik dan berkelanjutan, sehingga dapat menjadi motor penggerak perekonomian Jambi.

Peranan investasi sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yang lebih berkesinambungan terus diupayakan peningkatannya. Meskipun minat investasi belum pulih antara lain tercermin dari masih rendahnya nilai persetujuan investasi. Melalui berbagai langkah pokok antara lain penyederhanaan prosedur investasi, peningkatan kepastian hukum, serta perbaikan kualitas infrastruktur, iklim investasi dalam tahun 2010 diperkirakan membaik. Investasi berupa pembentukan modal tetap bruto (PMTB), diharapkan dapat tumbuh sebesar 10 persen yang berarti lebih besar dari pertumbuhan PMTB tahun 2008 yang hanya sebesar 8,68 persen. Sehingga diharapkan dapat menciptakan kesempatan kerja yang pada gilirannya mengurangi jumlah pengangguran.

Ditinjau dari sisi produksi, pertumbuhan sektor industri dan sektor pertanian semakin membaik dan telah mampu mendorong pertumbuhan sektor riil, khususnya pertanian, industri pengolahan, dan konstruksi. Hasil pembangunan pertanian, termasuk perikanan dan perkebunan melalui upaya revitalisasi pertanian, yang meliputi peningkatan kemampuan petani dan penguatan lembaga pendukungnya, pengamanan ketahanan pangan, peningkatan produktivitas, produksi, daya saing dan nilai tambah produk pertanian, pertumbuhan sektor pertanian diperkirakan dapat dijaga hingga

tumbuh sekitar 6,2 persen pada tahun 2010, yang didorong oleh sub sector perkebunan, perikanan dan peternakan.

Dukungan sarana dan prasarana sejak timbulnya krisis masih sangat terbatas. Pembangunan dan rehabilitasi yang telah dilakukan belum dapat memenuhi peningkatan kebutuhan sehingga kondisi pelayanan dan penyediaan infrastruktur (yang meliputi transportasi, energi, ketenagalistrikan pedesaan, sumberdaya air, serta perumahan, pelayanan air minum, dan penyehatan lingkungan). Untuk mengatasi hal tersebut dan mengingat keterbatasan sumber dana pemerintah, pada awal tahun 2006 telah dilaksanakan pembangunan infrastruktur yang bersifat sharing pendanaan antara pusat, provinsi dan Kabupaten/Kota serta mengupayakan peningkatan partisipasi swasta dalam dan luar negeri dalam pembangunan daerah. Sementara itu, untuk infrastruktur yang bersifat *non cost recovery* yang menjadi tanggung jawab pemerintah, baik pusat maupun daerah, semakin didorong pembangunannya sesuai dengan kemampuan pendanaan APBN dan APBD melalui program-program pembangunan yang lebih disinkronkan sehingga lebih efektif dan tidak tumpang tindih.

AGENDA MENINGKATKAN KEMAMPUAN DAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Dalam pelaksanaan Agenda Meningkatkan Kemampuan dan Pemerataan Pembangunan Daerah, ditujukan pada upaya peningkatan kemampuan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi; Peningkatan kemampuan pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian lingkungan hidup; Peningkatan pembangunan perdesaan; Revitalisasi Pembangunan pertanian; Pengurangan ketimpangan pembangunan antar daerah dan kawasan; serta Pengurangan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan antar golongan masyarakat.

Pada sisi Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) di Provinsi Jambi dihadapkan pada masih rendahnya kontribusi IPTEK disektor Hulu dan Hilir. Sehingga untuk komoditi unggulan Jambi belum banyak tersentuh oleh pemanfaatan IPTEK. Untuk itu, kedepan semua produk andalan Jambi dapat diberi muatan *processing* yang memanfaatkan IPTEK sehingga dapat meningkatkan daya saing produk di pasar global serta juga

dapat meningkatkan mata rantai nilai tambah dan berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan petani yang berkelanjutan.

Dalam perspektif pembangunan yang berkelanjutan, sumber daya alam dan lingkungan hidup tidak hanya dapat dijadikan sebagai modal pertumbuhan ekonomi tapi juga berfungsi sebagai penopang sistem kehidupan. Bagi Provinsi Jambi, sumber daya alam seperti pertambangan dan pertanian sangat berperan sebagai sumber perekonomian daerah, dan masih sangat signifikan perannya di masa mendatang. Khusus untuk pertanian perannya sangat besar dalam perekonomian Provinsi Jambi. Hal ini terindikasi oleh cukup tingginya kontribusi sektor pertanian (tanaman pangan, kehutanan, perkebunan, peternakan dan perikanan). Sampai tahun 2008 kontribusi sector pertanian mencapai 23,47 persen dari produk domestik regional bruto (PDRB) Provinsi Jambi berdasarkan harga berlaku, dan menyerap cukup banyak tenaga kerja atau 701.390 orang (59,3%) dari total angkatan kerja pada tahun 2008. Namun untuk Provinsi Jambi, secara umum pengelolaan SDA yang dikelola masih belum berkelanjutan dan masih mengabaikan kelestarian fungsi lingkungan hidup, bahkan cenderung agresif, eksploitatif dan ekspansif sehingga daya dukung lingkungan menurun, ketersediaan SDA menipis, bahkan cenderung sudah berada pada tahap yang sangat mengkuatirkan. Hal ini sangat terlihat sampai saat ini masih sangat maraknya kejadian pembalakan liar (*illegal logging*), tebang berlebih (*over cutting*) serta penyelundupan kayu ke luar negeri yang telah mempercepat pengurangan sebagian besar hutan di Provinsi Jambi.

Selain itu, Kawasan perdesaan menghadapi berbagai masalah internal dan eksternal yang menghambat terwujudnya kawasan permukiman perdesaan yang produktif, berdaya saing dan nyaman. Karena itu, upaya meningkatkan peran dan kontribusi kawasan perdesaan sebagai basis pertumbuhan ekonomi daerah, penciptaan lapangan kerja berkualitas di perdesaan, khususnya lapangan kerja non pertanian, melalui pengurangan angka pengangguran terbuka dan setengah pengangguran; Meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan; Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur di kawasan permukiman di perdesaan dan adanya akses, kontrol dan partisipasi seluruh elemen masyarakat dalam kegiatan pembangunan perdesaan akan terus diupayakan.

Upaya Revitalisasi pertanian terkait erat dengan pembangunan perdesaan, karena sebahagian besar penduduk Provinsi Jambi hidup di pedesaan dan hidup dari bertani. Untuk Provinsi Jambi, sektor pertanian dalam arti luas (Tanaman Pangan dan bahan makanan, peternakan, hortikultura, perkebunan, perikanan dan kehutanan) masih merupakan penopang keberlanjutan pembangunan. Keadaan ini terlihat sampai tahun 2008 sektor pertanian masih memberikan kontribusinya sebesar 23,47 persen dari produk domestik regional bruto (PDRB) Provinsi Jambi. Demikian juga dalam penyerapan tenaga kerja dan pemenuhan ketersediaan pangan. Dalam hal penyerapan tenaga kerja, terlihat lebih separuh jumlah tenaga kerja bekerja di sektor pertanian, karena jumlah yang bekerja di sektor pertanian mencapai 59,3.% dari seluruh tenaga kerja pada tahun 2008. Sedangkan untuk pemenuhan ketersediaan pangan serta dalam rangka memenuhi hak atas pangan bagi masyarakat Jambi, selama 2008 telah mampu menjaga ketersediaan pangan seperti beras dan jagung, Namun penyediaan daging ruminansia dan kedelai produksinya belum mencapai kebutuhan pada tahun 2008, namun pada tahun 2009 ini semua kebutuhan yang telah ditargetkan diperkirakan akan tercapai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Provinsi Jambi.

Sejalan dengan itu, di Provinsi Jambi juga terdapat wilayah-wilayah yang masih relatif belum maju dan tertinggal terutama wilayah perbatasan yang membutuhkan intervensi kebijakan pembangunan dari pemerintah, sehingga diharapkan dapat mempercepat pembangunan di wilayah-wilayah ini yang dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dan mengurugi ketimpangan pembangunan antar daerah dan antar kawasan.

Walaupun telah dapat dicapai berbagai keberhasilan, namun dalam upaya penurunan kemiskinan belum sesuai dengan harapan kita. Dari hasil survei SUSENAS tahun 2005 jumlah penduduk miskin mencapai 317.800 orang atau 11,88 persen dari jumlah penduduk, kemudian pada tahun 2006 naik menjadi 335.689 orang atau 12,72 persen. Kenaikan ini seperti Kita ketahui bersama tidak terlepas dari terjadinya kenaikan harga BBM pada bulan Oktober 2006, yang menyebabkan tingkat inflasi mencapai 10,66 persen, dan mengakibatkan turunnya daya beli masyarakat. Sedangkan

penduduk miskin tahun 2007 menurun menjadi 281.900 orang atau 10,27 persen dari jumlah penduduk. Terjadinya penurunan ini tidak terlepas dari peningkatan pendapatan masyarakat terutama pada sektor basis pertanian yang diakibatkan oleh naiknya harga produk perkebunan terutama Kelapa Sawit.

Upaya mengurangi ketimpangan pembangunan pada wilayah perbatasan dan kawasan erat kaitannya dengan upaya penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan. Pada tahun 2008 jumlah penduduk miskin di Provinsi Jambi diperkirakan sebesar 260.000 orang – 275.000 orang atau sekitar 9,3 persen dari total penduduk. Untuk itu, pengurangan penduduk miskin, selain merupakan pelaksanaan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat, untuk meningkatkan hak dan martabatnya, juga salah satu cara untuk meningkatkan daya saing di masa depan adalah melalui perbaikan kemampuan si miskin, sehingga akan membuka jalan untuk meningkatkan kemampuan ekonomi setiap tingkatan ke tingkat yang lebih tinggi. Upaya penanggulangan kemiskinan harus berjalan seiring dengan upaya untuk meningkatkan pemerataan, mengurangi kesenjangan antar wilayah, antar kelompok dan antar individu.

AGENDA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG BERKUALITAS

Pelaksanaan agenda ini diarahkan pada upaya: Peningkatan Pendidikan yang Berkualitas; Peningkatan Mutu dan Layanan Kesehatan; Peningkatan Kesejahteraan Sosial dan Keluarga Kecil Berkualitas; Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama; Peningkatan Peran Pemuda dan Pembangunan Olah Raga; Peningkatan Peran Perempuan dan Perlindungan Anak; Peningkatan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata Daerah.

Upaya peningkatan pendidikan yang berkualitas ditandai dengan meningkatnya Berbagai indikator kualitas SDM Provinsi Jambi yang semakin membaik namun masih relatif rendah. Dari tahun 2005 sampai tahun 2007 angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Jambi terus meningkat dari 71,2 tahun 2005 meningkat menjadi 71,5 tahun 2007. IPM merupakan komposit dari Angka Harapan Hidup saat lahir pada tahun 2007 sebesar

68,6 tahun, angka melek aksara penduduk usia 15 tahun ke atas sebesar 96 persen, dan gabungan angka partisipasi kasar jenjang pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi sebesar 64,13 persen, rata-rata lama sekolah sebesar 7,63 tahun dan Pendapatan Domestik Bruto per kapita yang dihitung berdasarkan paritas daya beli (*purchasing power parity*) sebesar Rp 622.990 Diperkirakan tahun 2009 akan mengalami peningkatan, sejalan dengan semakin meningkatnya alokasi anggaran untuk pendidikan dan kesehatan serta meningkatnya daya beli masyarakat sebagai akibat semakin membaiknya perekonomian nasional dan daerah.

Walaupun penduduk Jambi masih menghadapi kesulitan untuk mengakses serta mengalami rendahnya kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan. Penyediaan pelayanan pendidikan belum dapat menjangkau seluruh kelompok masyarakat. Ketimpangan taraf pendidikan antar kelompok masyarakat juga masih tinggi bahkan cenderung meningkat. Selain akibat perbedaan tingkat pendapatan, hal tersebut juga disebabkan oleh tingkat kesadaran masyarakat yang masih belum melihat pendidikan sebagai bentuk investasi. Kualitas pendidikan masih rendah dan belum sepenuhnya mampu mengembangkan potensi peserta didik dan kecakapan hidupnya. Kualitas pendidikan juga masih mengalami ketimpangan antar satuan pendidikan antar daerah. Tantangan utama dalam pembangunan pendidikan adalah desentralisasi pendidikan belum sepenuhnya terlaksana. Sementara itu, pembiayaan pendidikan belum mampu mencapai 20 persen dari APBN dan APBD sesuai amanat UUD 1945 dan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Dalam pembangunan kesehatan status kesehatan masyarakat, terutama, penduduk miskin masih rendah dan disparitas status kesehatan juga masih tinggi. Jenis penyakit yang diderita oleh sebagian besar masyarakat adalah penyakit infeksi menular, namun terdapat kecenderungan terjadi peningkatan penyakit tidak menular. Kapasitas pelayanan kesehatan masih rendah serta jumlah dan kualitas tenaga kesehatan masih terbatas. Tantangan penting lainnya yang dihadapi dalam pembangunan kesehatan adalah perilaku masyarakat yang kurang mendukung pola hidup bersih dan sehat; rendahnya kondisi kesehatan

lingkungan; serta pembiayaan kesehatan masih terbatas dan pola alokasinya belum optimal.

Disisi lain, peningkatan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan perempuan terus mengalami kemajuan. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan KB, jumlah kelompok Bina Keluarga Balita, dan jumlah anggota UPPKS yang melakukan usaha ekonomi produktif terus meningkat. Upaya pembangunan bidang kesejahteraan sosial lebih ditingkatkan lagi, antara lain melalui pemberdayaan anak terlantar, anak jalanan, dan santunan bagi lanjut usia terlantar serta peningkatan rehabilitasi dan perlindungan sosial, serta penyempurnaan sarana dan prasarana pusat rehabilitasi dan panti cacat bagi para penyandang cacat. Partisipasi dan perlindungan perempuan dalam pembangunan meskipun membaik namun masih rendah. Perempuan juga masih mengalami adanya berbagai bentuk praktek diskriminasi, kekerasan, dan eksploitasi. Akses sebagian besar perempuan terhadap layanan kesehatan yang baik, pendidikan yang lebih tinggi, dan keterlibatan dalam kegiatan publik yang lebih luas masih terbatas.

AGENDA PEMBANGUNAN HUKUM DAN TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK

Pada tahun 2008 dan 2009 ini pelaksanaan agenda pembangunan hukum dan tata pemerintah yang baik, masih dihadapkan pada masalah; lemahnya kinerja pelayanan publik yang diberikan oleh instansi pemerintah Provinsi dan Provinsi Jambi; Hal ini disebabkan belum dipahaminya prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, terutama menyangkut azas transparansi, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi pelayanan publik, sehingga masih banyaknya pelanggaran disiplin, penyalahgunaan wewenang terutama pada instansi pelayanan publik. Disisi lain, upaya perbaikan penegakan hukum dan kepastian hukum yang dirasakan tidak adil, tidak tegas dan diskriminatif oleh masyarakat telah berjalan pada arah yang lebih baik. Hal ini terkait erat dengan upaya penegakan keadilan melalui Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, memperlihatkan keseriusan pemerintah untuk mendorong terwujudnya aparatur yang baik, bersih dan berwibawa.

Momentum ini terus dijaga dan ditingkatkan dengan menekankan pada pelaksanaan pengawasan internal pemerintah dan mengoptimalkan pengawasan oleh pihak eksternal, serta memberikan peluang bagi peranserta masyarakat dalam pengawasan secara lebih luas. Sejalan dengan upaya tersebut, di sisi lain dilakukan peningkatan kinerja, profesionalitas dan tingkat kesejahteraan aparatur daerah sehingga menghasilkan kualitas pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Upaya penegakan hukum, pemberantasan korupsi dan reformasi berjalan seiring dan harus segera dituntaskan dalam rangka memperkuat basis pembangunan yang berkelanjutan. Upaya penegakan hukum secara konsisten sangat penting untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan dan kebenaran, supremasi hukum, serta menghargai hak asasi manusia. Perilaku korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, akan tetapi juga mengakibatkan ekonomi biaya tinggi, serta rusaknya moral bangsa yang pada akhirnya menjadi beban masyarakat luas. Perilaku korupsi di lingkungan penegakan hukum dan birokrasi telah memudarkan kepercayaan masyarakat terhadap upaya penegakan hukum dan penyelenggaraan pemerintahan. Selanjutnya peranan birokrasi sangat penting di dalam pelaksanaan pembangunan. Birokrasi seharusnya adalah dinamisator pembangunan dan mampu menciptakan kondisi yang kondusif bagi terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Pada kenyataannya kondisi birokrasi Indonesia selain sarat dengan masalah KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme), birokrasi masih dianggap lemah dan tidak profesional, dan seringkali dianggap sebagai penghambat pelaksanaan pembangunan.

Disisi lain pemantapan keamanan dan ketertiban serta penyelesaian konflik merupakan prasyarat untuk beriangsungnya kegiatan pembangunan di berbagai bidang, terlebih lagi bagi para investor yang akan menanamkan modalnya dalam rangka peningkatan kegiatan ekonomi. Berbagai gangguan keamanan di Provinsi Jambi yang belum dapat diimbangi dengan penuntasan penanganan oleh penegak hukum dapat melemahkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan secara keseluruhan. Kondisi tidak aman yang dihadapi masyarakat Jambi dapat diakibatkan oleh kejahatan konvensional, aksi radikalisme dengan latar belakang etnis, ras, agama, dan ideologi, konflik komunal, kejahatan lintas

daerah seperti penyelundupan barang, narkoba dan kejahatan lainnya, gangguan keamanan laut, perompakan, penangkapan ikan secara illegal, pelanggaran wilayah laut; dan perusakan lingkungan seperti pembalakan, pembuangan limbah.

A.2. MASALAH DAN TANTANGAN UTAMA 2010

Beberapa masalah dan tantangan utama yang dihadapi Provinsi Jambi pada tahun 2010 adalah sebagai berikut.

1. Revitalisasi Pertanian dan UKM

Walaupun sampai tahun 2008, sektor pertanian masih dapat memenuhi ketersediaan pangan Provinsi Jambi terutama makanan pokok beras, namun secara keseluruhan terlihat bahwa sektor pertanian mengalami penurunan kontribusinya dalam hal penyediaan pangan. Gejala penurunan luas panen juga terjadi pada palawija. Terjadinya penurunan luas panen dan produksi padi dan palawija di atas tidak terlepas dari tidak menguntungkannya untuk melakukan usaha tani lagi baik untuk padi sawah maupun palawija. Kondisi ini diperparah oleh stagnasinya dunia penyuluhan beberapa tahun belakangan ini. Namun yang perlu mendapat perhatian adalah dimana penurunan luas panen ini juga disebabkan terkonversinya lahan-lahan subur pertanian untuk ditanam dengan komoditi perkebunan terutama kelapa sawit. Terkonversinya lahan subur ini disebabkan komoditi sawit dan karet dirasakan lebih memberikan keuntungan dibanding usaha tanaman pangan.

Sedangkan untuk sarana dan prasarana perikanan di wilayah timur Provinsi Jambi seperti Tanjab Barat dan Timur potensinya cukup besar namun belum dimanfaatkan secara optimal. Secara umum permasalahan dan kendala yang dihadapi sektor pertanian saat ini dan ke depan adalah (i) relatif masih rendahnya tingkat kesejahteraan petani dan cukup tingginya angka kemiskinan petani dan nelayan; (ii) Semakin menyempitnya lahan yang dikuasai petani; (iii) sangat terbatasnya akses terhadap permodalan (iv) Masih rendahnya penguasaan teknologi dan kualitas SDM pertanian; (v) pengelolaan sumberdaya perikanan belum optimal dilakukan, (vi) terdapatnya penurunan hasil hutan (kayu) sedangkan pemanfaatan hasil non kayu belum optimal, serta (vii) lemahnya infrastruktur yang ada di sektor

pertanian, (viii) di bidang pangan, masih dihadapi masalah tingginya ketergantungan pada beras (nabati).

Sementara itu permasalahan yang dihadapi oleh usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi; antara lain; (a). Rendahnya produktivitas dan pendapatan, terutama yang berkaitan dengan rendahnya kualitas sumber daya manusia UMKM khususnya dalam bidang manajemen, organisasi, penguasaan teknologi, dan pemasaran; serta rendahnya kompetensi kewirausahaan UMKM. (b). Terbatasnya akses UMKM dan Koperasi kepada sumberdaya produktif, (c) Rendahnya kualitas kelembagaan dan organisasi koperasi, (d) Tertinggalnya kinerja koperasi dalam memberikan kontribusi terhadap perekonomian dibandingkan dengan badan usaha lainnya dan kurang baiknya citra koperasi mengakibatkan terkikisnya kepercayaan masyarakat, (e). Kurang kondusifnya iklim usaha

2. Pembangunan Infrastruktur

Di bidang pembangunan infrastruktur permasalahan yang dihadapi menyangkut sumber daya air, transportasi, energi, ketenagalistrikan, perumahan dan pemukiman masih akan menjadi prioritas dalam pembangunannya. Adapun permasalahan yang dihadapi antara lain :

a. Sumber Daya Air

- Ketidakseimbangan antara pasokan dan kebutuhan air yang tersedia pada musim hujan dan pada musim kemarau, menyebabkan ketersediaan air yang sangat melimpah pada musim hujan, yang selain menimbulkan manfaat, pada saat yang sama juga menimbulkan potensi bahaya kemanusiaan berupa banjir. Sedangkan pada musim kemarau, kelangkaan air telah menimbulkan potensi bahaya kemanusiaan lainnya berupa kekeringan yang berkepanjangan.
- Meningkatnya ancaman terhadap keberlanjutan daya dukung sumberdaya air, baik air permukaan maupun air tanah. Kerusakan lingkungan yang semakin luas akibat kerusakan hutan secara signifikan telah menyebabkan penurunan daya dukung Daerah Aliran Sungai (DAS) dalam menahan dan menyimpan air.

- Menurunnya kemampuan penyediaan air akibat berkembangnya daerah pemukiman dan industri telah menurunkan area resapan air dan mcngancam kapasitas lingkungan dalam menyediakan air. Pada sisi lain, kapasitas infrastruktur penampung air menurun sebagai akibat meningkatnya sedimentasi, sehingga menurunkan keandalan penyediaan air untuk ingasi maupun air baku. Kondisi ini diperparah dengan kualitas operasi dan pemeliharaan yang rendah sehingga tingkat layanan prasarana sumberdaya air menurun semakin tajam.
- Intrusi air laut ke daratan dengan volume yang sangat besar dalam waktu yang singkat telah mengakibatkan pencemaran sumber-sumber air dan mengganggu penyediaan air baku bagi masyarakat, terutama di wilayah Provinsi Jambi dan Tanjung Jabung Timur.

b. Transportasi

- Secara umum permasalahan transportasi jalan adalah : (1) Pelayanan jasa transportasi yang belum merata di setiap pusat kegiatan di Provinsi Jambi; (2) Kurangnya keterpaduan antar dan intra moda yang mengakibatkan kurang efektifnya pelayanan jasa angkutan; (3) Masih rendahnya disiplin dan ketertiban para pengguna jasa angkutan jalan, penyedia jasa dan masyarakat dalam mentaati ketentuan yang berlaku; (4) Masih tingginya kerusakan jalan akibat pelanggaran muatan lebih; (5) Masih terbatasnya pengembangan SDM di bidang LLAJ baik di tingkat regulator maupun operator; (6) Rendahnya kuantitas dan kualitas angkutan umum yang menyebabkan penurunan kualitas pelayanan.
- Dalam bidang lalu lintas sungai dan penyeberangan di Provinsi Jambi : (1) Masih terbatasnya jumlah prasarana dan sarana serta fasilitas keselamatan ASDP; (2) Masih rendahnya kesadaran para pemilik kapal untuk memenuhi kelengkapan dokumen dan keselamatan kapal, dan (3) Belum adanya penetapan jaringan trayek/lintas antar Provinsi Jambi setelah pelaksanaan otonomi daerah dan semakin terbukanya akses jalan raya.
- Permasalahan dalam transportasi laut yang paling menonjol adalah (1) Masih terbatasnya jumlah prasarana dan sarana serta fasilitas keselamatan; (2) Tingginya tingkat sedimentasi pantai; (3) Kurangnya

aksesibilitas menuju pelabuhan laut asngan angkutan jalan raya, dan (4) Belum adanya back area dan fasilitas penunjang pelabuhan Muara Sabak.

- Permasalahan di subsektor transportasi udara yang paling menonjol adalah : (1) terbatasnya prasarana bandara dan fasilitas keselamatan penerbangan dan fasilitas pendukung lainnya, (2) terbatasnya rute pelayanan dari dan ke Bandara Sultan Thaha, dan (3) peningkatan demand angkutan udara belum didukung oleh peningkatan layanan.

c. Energi, Ketenaga Listrikan

Pembangunan energi khususnya ketenaga listrik di Provinsi Jambi dihadapkan pada masalah (1) Keterbatasan Kapasitas Pembangkit, (2) Kurangnya Kemandirian Industri Ketenagalistrikan, (3) Tingginya Ketergantungan Terhadap BBM, (4) Rendahnya Kinerja Sarana dan Prasarana, (5) Belum Tercapainya Tingkat Tarif yang Ekonomis.

d. Perumahan dan Pemukiman

Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan perumahan dan pemukiman antara lain; Terbatasnya kemampuan penyediaan prasarana dan sarana dasar perumahan seperti Jl. Lingkungan, drainase dan persampahan; Menurunnya kualitas permukiman; Belum mantapnya kelembagaan penyelenggaraan pembangunan perumahan dan permukiman; Masih rendahnya efesiensi dalam pembangunan perumahan.

3. Pembangunan Sumberdaya Manusia

a. Pendidikan

Permasalahan pokok pendidikan di Provinsi Jambi antar lain:

1. Masih banyak anak usia sekolah yang tidak sekolah.
2. Belum meratanya sebaran pendidikan di Provinsi Jambi yang menyebabkan perbedaan APK/APM yang mencolok antara kabupaten dan kota.
3. Banyak jumlah sekolah yang rusak, 53,6% dari total 14.747 ruang kelas SD dan 19.6% dari total 2.260 ruang kelas SMP serta 27.37% dari total 1.030 ruang kelas SMA.

4. Masih banyak jumlah penduduk yang buta aksara, sampai tahun 2005 lebih kurang 51.540 orang dari total penduduk yang berumur 15 sampai 44 tahun.
5. Belum optimalnya proses belajar mengajar sebagai akibat sarana dan prasarana seperti buku, alat-praktik, alat peraga dan alat-alat laboratorium yang belum memadai.
6. Belum mencukupi tenaga kependidikan sesuai dengan persyaratan minimal.
7. Belum tercapainya kesejahteraan tenaga pendidik sesuai dengan harapannya.
8. Sistem Informasi Manajemen yang menyajikan data dan informasi belum berjalan dengan baik.
9. Belum mantapnya koordinasi antara dinas Provinsi Jambi dengan dinas provinsi terhadap perencanaan, pelaksanaan dan monitoring serta evaluasi.
10. Pelaksanaan muatan lokal yang masih bersifat umum dan belum menyentuh langsung terhadap kepentingan daerah masing-masing.
11. Distribusi tenaga pendidik yang tidak proporsional antar daerah maupun antara sekolah pada daerah yang sama, terutama yang berhubungan dengan tenaga pendidik bagi bidang ilmu tertentu.
12. Masih rendahnya serapan dunia usaha dan industri untuk menerima tenaga kerja tingkat menengah karena masih dianggap kurang terampil dan kurang profesional.

Begitu pula dengan dinamika perubahan struktur penduduk yang berpengaruh pada pembangunan pendidikan. Penurunan penduduk usia muda terutama kelompok usia 7-12 tahun sebagai dampak positif program Keluarga Berencana menyebabkan penurunan jumlah siswa SD/MI dari tahun ke tahun. Pada saat yang sama terjadi pula perubahan struktur usia siswa SD/MI dengan semakin menurunnya siswa berusia lebih dari 12 tahun dan meningkatnya siswa berusia kurang dari 7 tahun. Hal tersebut terus dipertimbangkan dalam menyediakan fasilitas pelayanan pendidikan sehingga efisiensi dapat terus ditingkatkan. Pada saat yang sama terjadi peningkatan proporsi penduduk usia dewasa. Dengan demikian penyediaan layanan pendidikan sepanjang hayat melalui pendidikan non formal terus

dikembangkan pula untuk dapat memberi pelayanan pendidikan sesuai kebutuhan mereka.

Disamping itu, masih terdapatnya anak putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan pada tingkat yang lebih tinggi maupun tidak sampai menamatkan pendidikannya pada satu tingkat pendidikan terutama di daerah-daerah pedesaan dan kawasan terpencil.

Selain itu, Masyarakat miskin menilai bahwa pendidikan masih terlalu mahal dan belum memberikan manfaat yang signifikan atau sebanding dengan sumberdaya yang dikeluarkan. Oleh karena itu pendidikan belum menjadi pilihan investasi. Meskipun SPP telah secara resmi dihapuskan oleh pemerintah tetapi pada kenyataannya masyarakat tetap harus membayar iuran sekolah. Pengeluaran lain di luar iuran sekolah seperti pembelian buku, alat tulis, seragam, uang transport, dan uang saku menjadi faktor penghambat pula bagi masyarakat miskin untuk menyekolahkan anaknya. Beban masyarakat miskin untuk menyekolahkan anaknya menjadi lebih berat apabila anak mereka turut bekerja membantu orangtua.

Fasilitas pelayanan pendidikan khususnya untuk jenjang pendidikan menengah pertama dan yang lebih tinggi belum tersedia secara merata. Fasilitas pelayanan pendidikan di daerah pedesaan dan kawasan terpencil masih sangat terbatas menyebabkan sulitnya anak-anak untuk mengakses layanan pendidikan. Selain itu, fasilitas dan layanan pendidikan khusus bagi anak-anak yang mempunyai kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa yang juga belum tersedia secara memadai.

Kualitas pendidikan masih rendah dan belum mampu memenuhi kebutuhan kompetensi peserta didik. Hal tersebut terutama disebabkan oleh: (1) ketersediaan pendidik yang belum memadai baik secara kuantitas maupun kualitas, (2) kesejahteraan pendidik yang masih rendah, (3) fasilitas belajar belum tersedia secara mencukupi, (4) sebaran lembaga pendidikan yang tidak proporsional dan (5) biaya operasional pendidikan belum memadai. Upaya untuk meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan terus dilaksanakan selama kurun waktu lima tahun terakhir, karena disadari bahwa kualitas tenaga pendidik sangat berpengaruh terhadap kualitas pendidikan.

b. Kesehatan

Permasalahan utama yang dihadapi saat ini adalah akses dan mutu pelayanan kesehatan yang masih rendah, yang dicerminkan dengan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Balita (AKABA) yang belum sebaiknya rata-rata Nasional, demikian juga status gizi kurang Balita serta beberapa penyakit menular yang masih tinggi.

Adapun permasalahan pokok yang dihadapi antara lain ;

1. Disparitas status kesehatan.
2. Kinerja pelayanan kesehatan yang rendah, yang menyebabkan tingginya angka kematian bayi di Provinsi Jambi.
3. Perilaku masyarakat yang kurang mendukung pola hidup bersih dan sehat.
4. Rendahnya kondisi kesehatan lingkungan.
5. Rendahnya kualitas, pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan.
6. Terbatasnya sarana dan prasarana kesehatan di Provinsi Jambi pada saat ini masih belum memadai baik secara kuantitas maupun kualitasnya.
7. Terbatasnya tenaga kesehatan dan distribusi tidak merata. Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan belum memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas dengan penyebaran yang tidak merata.
8. Rendahnya status kesehatan penduduk miskin.
9. Terbatasnya Sumber Daya Obat dan Perbekalan Kesehatan.
10. Terbatasnya kegiatan untuk Pemberdayaan Masyarakat.

Dalam rangka mempercepat tercapainya Jambi Sehat 2008, pemberdayaan masyarakat dilaksanakan pula dalam berbagai bentuk, seperti; Gebrak Malaria, Gerakan Sayang Ibu (GSI), Revitalisasi Posyandu dan lain-lain. Banyak upaya kesehatan berbasis masyarakat maupun yayasan atau gerakan-gerakan kurang berjalan karena kurangnya kemampuan dalam menggali dana-dana.

Sementara itu masih ada kesan bahwa program peningkatan kesehatan masyarakat selama ini dimonopoli oleh instansi kesehatan dan

provider, sedangkan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan kesehatan yang dilakukan oleh banyak pihak, seperti NGOs dan kalangan swasta kurang mendapat respon yang positif. Jaringan kemitraan antara sektor pemerintah dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) belum dikembangkan secara optimal dan belum terinventarisasi LSM yang concern dibidang kesehatan. Kondisi ini menjadikan upaya pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan kurang terkoordinasi dalam mendukung kebijakan sistem kesehatan daerah.

4. Pembangunan SDA dan Pariwisata

Berbagai permasalahan muncul dan memicuterjadinya kerusakan Sumber Daya Alam dan lingkungan hidup sehingga dikhawatirkan akan berdampak besar keseimbangan ekosistem dan kehidupan masyarakat di Provinsi Jambi. Beberapa permasalahan pokok dapat digambarkan berikut ini :

Terus menurunnya kondisi hutan Provinsi Jambi. Pengelolaan hutan yang tidak berkelanjutan yang telah dipraktekkan dalam dekade terakhir telah menimbulkan dampak negatif. Hal ini terlihat dari sangat tingginya laju penurunan luas hutan di Provinsi Jambi yang mencapai - 2,44% per tahun dalam kurun waktu 13 tahun terakhir. Kondisi ini juga berimplikasi pada degradasi daya dukung daerah aliran sungai (DAS) yang mengakibatkan kerusakan hutan sedimentasi yang tinggi menyebabkan kapasitas daya tampung sungai Batanghari dan anak-anaknya semakin menurun. Kejadian ini sangat berdampak pada meningkatnya debit air sungai secara tidak terkendali di musim hujan. Hal ini berakibat pada meningkatnya frekwensi banjir sepanjang tahun. Seringnya banjir sangat berdampak pada pola tanam dan sangat berpengaruh pada produktifitas hasil pertanian masyarakat. Bahkan tidak jarang tingginya frekwensi banjir yang datang secara tiba-tiba telah mengahcurkan sumber kehidupan (pertanian) yang merupakan sumber ekonomi dan mata pencarian sebagian besar masyarakat Provinsi Jambi.

Permasalahan lainnya yang perlu diantisipasi dalam pengelolaan kehutanan ini adalah sangat lemahnya penegakan hukum terhadap pembalakan liar (ilegal logging), permabahan dan okupasi kawasan hutan,

perburuan satwa dan tumbuhan liar yang dilindungi, pembakaran hutan, peredaran hasil hutan illegal, tebang berlebih (over cutting), penyeludupan kayu ke luar negeri, dan tindakan illegal lainnya banyak terjadi. Diperkirakan kegiatan-kegiatan illegal tersebut saja telah menyebabkan dan mempercepat hilangnya hutan di Provinsi Jambi seluas 739.768 ha selama satu dekade terakhir. Selain penegakan hukum yang lemah, juga disebabkan oleh aspek penguasaan lahan yang sarat masalah, praktek pengelolaan hutan yang tidak lestari, dan terhambatnya akses masyarakat terhadap sumber daya hutan.

Disamping itu rendahnya kapasitas pengelolaan kehutanan, sarana-prasarana, kelembagaan, sumber daya manusia, demikian juga insentif bagi pengelola kehutanan sangat terbatas bila dibandingkan dengan cakupan luas kawasan yang harus dikelolanya berkontribusi terhadap sulitnya penanggulangan masalah kehutanan seperti pencurian kayu, kebakaran hutan. Disamping itu, partisipasi masyarakat untuk ikut serta mengamankan hutan juga sangat rendah.

Permasalahan selanjutnya adalah sistem pemanfaatan hutan terutama hasil hutan non kayu dan jasa lingkungan dari ekosistem hutan, seperti nilai hutan sebagai sumber air, keanekaragaman hayati, keindahan alam (wisata alam) yang memiliki potensi ekonomi, belum dikembangkan seperti yang diharapkan.

Berdasarkan hasil penelitian, nilai jasa ekosistem hutan kayu hanya sekitar 7% dari total nilai ekonomi hutan, sisanya adalah hasil hutan non kayu dan jasa lingkungan. Dewasa ini permintaan terhadap jasa lingkungan mulai meningkat, khususnya untuk air minum kemasan, obyek penelitian, wisata alam.

Permasalahan lainnya dalam pengelolaan hutan ini adalah masyarakat sekitar hutan kurang dilibatkan dalam pengusahaan dan penataan batas kawasan hutan. Masyarakat lokal (adat) yang banyak berada disekitar kawasan hutan dan dalam juga merupakan potensi yang baik sekaligus menjadi potensi permasalahan jika dalam pengelolaan hutan tersebut diabaikan, sehingga yang muncul adalah klaim terhadap lahan hutan, sebagai contoh permasalahan yang terjadi adalah penunjukan suatu kawasan mejadi hutan konsevasi atau hutan lindung seringkali mengabaikan

partisipasi masyarakat setempat. Tanpa ada pengakuan partisipasi masyarakat setempat sulit terwujud pengelolaan hutan yang lestari dan berkelanjutan.

Kerusakan DAS (Daerah Aliran Sungai). Pengelolaan hutan yang tidak berkelanjutan di Provinsi Jambi seperti *illegal logging* (pembalakan liar), *over cutting* (tebang berlebih) serta terjadi konversi lahan perkebunan seperti sawit telah meningkatkan kerusakan ekosistem dalam tatanan DAS. Pada saat ini diperkirakan DAS Batanghari sudah berada dalam kondisi kritis. Kerusakan DAS ini juga dipacu oleh pengelolaan DAS yang kurang terkoordinasi antara hulu dan hilir serta kelembagaan ekosistem secara luas, khususnya cadangan dan pasokan air yang sangat dibutuhkan untuk irigasi, industri, dan konsumsi rumah tangga.

Kerusakan habitat ekosistem pesisir seperti deforestasi hutan/pantai mangrove serta terjadinya degradasi telah mengakibatkan erosi pantai dan berkurangnya keanekaragaman hayati (*biodiversiti*). Untuk itu kedepan sangat diperlukan upaya meningkatkan konservasi pesisir dan laut, serta rehabilitasi ekosistem yang rusak. Hal ini dapat dilakukan dengan membangun sistem pengendalian dan pengawasan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup di wilayah pesisir dan laut. Disamping itu penataan industri perikanan dan kegiatan ekonomi masyarakat di wilayah pesisir juga sangat penting diperhatikan.

Disamping itu, laju sedimentasi yang cukup tinggi juga sangat berperan merusak kawasan pesisir timur Provinsi Jambi yang merupakan muara sungai Batanghari. Hal ini terlihat dari terjadinya pendangkalan yang cukup cepat, yang disebabkan cukup tingginya laju sedimentasi sebagai akibat kegiatan pengelolaan lahan hutan yang tidak berkelanjutan di kawasan hulu sungai terutama yang dilalui sungai Batanghari dan anaknya. Disamping itu pencemarannya yang cukup memprihatinkan juga perlu diperhatikan terutama pencemaran yang berasal dari kegiatan industri, rumah tangga, pertanian, kegiatan perhubungan.

Dengan beroperasi dan akan dibukanya beberapa pertambangan, seperti tambang batubara di beberapa kabupaten perlu mendapat perhatian ke depan. Karena selama ini citra pertambangan selalu dipersepsikan dengan citra yang selalu merusak lingkungan. Hal ini disebabkan karena

sifat usaha pertambangan terutama pertambangan batubara, khususnya pertambangan yang sifatnya terbuka (*open pit mining*), selalu merubah bentangan alam sehingga mempengaruhi ekosistem dan habitat aslinya. Pertambangan terbuka ini akan dapat mengganggu keseimbangan fungsi lingkungan hidup dan berdampak buruk bagi kehidupan manusia sehingga keberadaan pertambangan semacam ini selalu di tolak atau menimbulkan pro dan kontra ditengah masyarakat. Kondisi ini, khususnya untuk Provinsi Jambi di perburuk dengan maraknya pertambangan tanpa izin (PETI) di sepanjang DAS Batanghari dan anak-anak sungainya. Aktifitas PETI yang juga menggunakan air raksa atau mercury ini disamping akan mencemari air sungai yang sangat dibutuhkan untuk keperluan sehari-hari, juga akan dapat mencemari iar untuk kegiatan pertanian dan perikanan.

Di sisi lain, pelestarian plasma nutfah asli juga belum berjalan baik. Kerusakan ekosistem dan perburuan satwa dan tumbuhan yang dilindungi secara liar, yang dilatar belakangi rendahnya kesadaran masyarakat, mejadi ancaman utama bagi keanekaragaman hayati perlu diantisipasi kedepan, terutama yang berpotensi tetapi belum banyak dimanfaatkan seperti tanaman obat-obatan yang berjumlah 68 jenis areal Taman Nasional Bukit Dua Belas dan kawasan hutan lainnya.

Begitu juga pada pembangunan pariwisata dihadapkan pada permasalahan antara lain ; **kurangnya kemampuan daerah dalam mengelola kekayaan budaya yang kasat mata (tangible) dan yang tidak kasat mata (intangible)**. Dalam era otonomi daerah, pengelolaan kekayaan budaya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Kualitas pengelolaan yang rendah tidak hanya disebabkan oleh kecilnya kapasitas fiskal, namun juga kurangnya pemahaman, apresiasi, kesadaran dan komitmen pemerintah daerah terhadap kekayaan budaya daerah. Pengelolaan kekayaan budaya ini juga masih belum sepenuhnya menerapkan prinsip tata pemerintahan yang baik (*good government*). Sementara itu, apresiasi dan kecintaan masyarakat terhadap budaya daerah dan produk daerah masih rendah. Antara lain karena keterbatasan informasi.

Terjadinya krisis nilai-nilai kebersamaan sebagai ciri budaya daerah. Budaya bangsa adalah akumulasi puncak-puncak kebudayaan daerah yang terdiri dari beragam suku bangsa. Nilai-nilai solidaritas sosial,

kekeluargaan, keramahan sosial, dan rasa cinta sesama sebagai puncak-puncak budaya daerah, yang pernah dianggap sebagai kekuatan pemersatu dan ciri khas budaya bangsa, makin pudar bersamaan dengan menguatnya nilai-nilai materialisme. Demikian pula yang terjadi pada tingkat nasional, bahwa kebanggaan atas jati diri anak bangsa, seperti penggunaan bahasa Indonesia secara baik dan benar, makin terkikis oleh nilai-nilai yang dianggap lebih unggul. Nilai-nilai luhur meluntur oleh cepatnya penyerapan budaya global yang negatif, dan tidak mempunyai daerah sebagai bagian integral pemerintah mengadopsi budaya global yang lebih relevan bagi upaya pembangunan dan pembentukan karakter kebangsaan (*nation and character building*). Lajunya pembangunan ekonomi yang kurang diimbangi oleh pembangunan karakter kebangsaan telah mengakibatkan krisis budaya yang selanjutnya memperlemah ketahanan budaya.

Lemahnya kemampuan daerah dalam mengelola keragaman etnik.

Gejala tersebut dapat dilihat dari pelaksanaan otonomi daerah Provinsi Jambi (birokrasi) maupun saat pilkada, dimana telah terjadi penguatan orientasi kelompok dan etnik yang berpotensi menimbulkan konflik sosial dan bahkan disintegari. Fenomena itu mengkhawatirkan karena Provinsi Jambi selain merupakan daerah tujuan transmigrasi, juga sebagai daerah yang relatif plural.

Bertitik tolak dari uraian dikemukakan diatas, yang menyangkut dengan realisasi pencapaian pembangunan dalam tahun 2008 dan perkiraan pencapaian pembangunan pada tahun 2009 serta tantangan yang dihadapi tahun 2010 sebagai pelaksanaan tahun terakhir RPJMD 2005-2010, memiliki tema **"Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur dan Revitalisasi Pertanian yang didukung SDM yang Handal dalam Pengelolaan SDA Menuju Jambi Mampu Maju dan Mandiri"**.

c. Prioritas-Prioritas Pembangunan 2010

Dalam RPJMD tahun 2005-2010 untuk melaksanakan keempat Agenda Pembangunan Daerah terdapat beberapa permasalahan pembangunan yang perlu di atasi dan menjadi prioritas pembangunan daerah. Sesuai dengan ketersediaan sumber daya yang terbatas dan kondisi umum daerah yang dihadapi, termasuk adanya masalah darurat yang perlu segera diatasi, maka tidak semua rencana pembangunan

tahunan atau RKPD ini akan dapat dianggarkan dalam APBD tahun 2010 nanti.

Sebagaimana telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya, berdasarkan permasalahan dan tatanan yang dihadapi pada tahun 2010 mengingat ketersediaan sumber daya yang terbatas, serta mengacu kepada Tema Pembangunan pada tahun 2010, prioritas-prioritas pembangunan dalam RPJMD yang menjadi prioritas pembangunan pada tahun 2010 adalah prioritas yang terfokus pada upaya penyelesaian masalah mendesak dan berdampak luas bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Prioritas-prioritas tersebut adalah sebagai berikut :

1. Revitalisasi Pertanian dan UKM

Sasaran

- a. Tercapainya pertumbuhan sektor pertanian, termasuk perikanan dan kehutanan sebesar 6,2 persen pada tahun 2010.
- b. Terciptanya lapangan kerja berkualitas di pedesaan, khususnya lapangan kerja non pertanian, yang ditandai dengan kurangnya angka pengangguran terbuka dan setengah pengangguran.
- c. Meningkatnya kesejahteraan petani, nelayan dan masyarakat pedesaan yang dicerminkan dari peningkatan dan produktivitas pekerja di sektor pertanian.

Arah Kebijakan

Masyarakat pedesaan merupakan bagian terbesar penduduk Provinsi Jambi, dengan kegiatan usaha berbasis pertanian dan sumber daya lokal lainnya. Oleh karena itu peningkatan kesejahteraan kelompok masyarakat tersebut dilakukan secara menyeluruh baik secara *spatial* (pedesaan). Pada dasarnya arah kebijakan yang memberdayakan masyarakat agar mampu mengelola potensai secara produktif dan efisien untuk meningkatkan kesejahteraannya. Untuk itu beberapa arah kebijakan pembangunan pertanian dan UKM adalah sebagai berikut :

1) Ketahanan Pangan Daerah

Upaya untuk mempertahankan ketahanan pangan daerah difokuskan pada tersedianya kebutuhan beras dari sentra-sentra produksi yang ada di

Provinsi Jambi dan didukung dengan produksi palawija dan daging. Untuk itu kegiatan prioritas yang akan dilakukan antara lain;

- a. Pengamanan ketersediaan pangan melalui peningkatan produksi padi sebesar 723.805 ton padi sawah dan 75.606 padi ladang;
- b. Peningkatan efisiensi sistem dan jaringan distribusi pangan yang mkenjamin keterjangkauan harga bahan pangan;
- c. Peningkatan produktivitas dan produksi pangan serta diversifikasi komoditi penghasil pangan pada areal perkebunan
- d. Peningkatan pasca panen dan pengolahan hasil untuk menurunkan susut pasca panen;
- e. Pengembangan sistem perlindungan tanaman dan hewan melalui penerapana dan perluasan upaya pengendalian hama, penyakit dan ghulam secara terpadu;
- f. Pengembangan kawasan sentra peternakan dan integrasi ternak tanaman serta pengelolaan lahan dan air (padang pengembalaan ternak, kebun hijauan makan ternak, sertifikasi padang pengembalaan).
- g. Pengembangan Desa Mandiri Pangan.

2) Peningkatan Produksi Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Perikanan, dan Kehutanan

Peningkatan produksi potensi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan dan kehutanan dimaksudkan untuk menciptakan usaha agribisnis yang dapat meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani. Untuk itu, upaya yang dilakukan antara lain :

- a. Pengembangan komoditi pertanian yang memiliki prospek pasar domestik dan internasional, seperti kentang, kedelai, dan jagung.
- b. Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu hortikultural dan sayuran spesifik lokasi.
- c. Penyediaan dan pengawasan peredaran dan penggunaan bibit bermutu.
- d. Rehabilitasi, intensifikasi dan ekstensifikasi komoditi karet.
- e. Peningkatan program pendidikan dan pelatihan bagi penyuluh pertanian dan petani.

- f. Pengawasan peredaran dan penggunaan pupuk dan pestisida.
- g. Pengembangan diversifikasi usaha tani dan perlindungan usaha perkebunan.
- h. Peningkatan nilai tambah produk pertanian / perikanan melalui pasca panen, peningkatan mutu, pengolahan hasil dan pemasaran.
- i. Pengembangan infrastruktur (sarana prasarana) pertanian, peternakan, perikanan serta perkebunan.
- j. Pengembangan agribisnis peternakan melalui pengembangan sentra, agropolitan, sistem informasi peternakan, penerapan teknologi pemasaran hasil, kelembagaan dan kemitraan usaha.
- k. Peningkatan akses terhadap sumber daya produktif, terutama permodalan berupa bantuan Pinjaman Langsung Masyarakat atau bergulir.
- l. Peningkatan usaha perikanan skala kecil dan peningkatan pemasaran, mutu, dan nilai tambahan produk perikanan.
- m. Pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar.
- n. Pengembangan budidaya patin Jambi.

3) Pemberdayaan Masyarakat Petani/Nelayan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing masyarakat pertanian, terutama petani/nelayan yang tidak dapat menjangkau akses terhadap sumber daya usaha pertanian. Kegiatan pokok yang akan dilakukan dalam program ini adalah :

- a. Pemberdayaan masyarakat petani/nelayan dalam memanfaatkan teknologi dan informasi pertanian melalui pelatihan dan studi banding.
- b. Revitalisasi sistem penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan.
- c. Penumbuhan dan penguatan lembaga pertanian dan perdesaan untuk meningkatkan posisi tawar petani dan nelayan dan pembudidaya ikan.
- d. Pemberdayaan petani melalui pelatihan dan penguatan assosiasi perkebunan.
- e. Penyederhanan mekanisme dukungan kepada petani dan pengurangan hambatan usaha pertanian/perikanan.

- f. Pengembangan upaya pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan petani.
- g. Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir.
- h. Penataan kembali usah budidaya tambak (air payau) dan air tawar.
- i. Penyempurnaan system pembenihan serta peningkatan pembangunan sarana dan prasarana perikanan.
- j. Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat, khususnya masyarakat yang hidup di sekitar hutan (peladang berpindah, pionir hutan, atau transmigran) dalam pengembangan hutan tanaman yang lestari.
- k. Peningkatan rehabilitasi daerah hulu untuk menjamin ketersediaan pasokan air irigasi untuk pertanian.

4) Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah

Dilakukan melalui Kegiatan Pokok antara lain ;

- a. Penciptaan iklim usaha bagi KUKM
- b. Pemberdayaan dan pendampingan KSP/USP koperasi penerima dana bergulir.
- c. Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan komtetitif KUMKM.
- d. Penumbuhan dan pemberdayaan sentra UKM.
- e. Peningkatan peran koperasi dalam mendukung usaha pertanian, perkebunan, peternakan, kalutan dan perikanan dan waserba.
- f. Pengembangan industri kecil menengah dan besar
- g. Pembinaan dan bantuan peralatan industri kecil
- h. Pengembangan dunia usaha PMDN dan PMA
- i. Peningkatan dan pengembagan ekspor dan perdagangan dalam negeri.
- j. Pengawasan peredaran pupuk.

2. PENINGKATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR.

Sasaran

Sasaran pembangunan infrastruktur adalah ;

- a. Pendayagunaan sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan irigasi, dan pembangunan infrastruktur pada kawasan banjir serta peningkatan pelayanan daerah irigasi 53,28% menjadi 65%.
- b. Meningkatkan sistem jaringan jalan yang ada dalam mendukung interkoneksi antara kawasan produksi dan jalur distribusi menuju daerah pemasaran dan outlet Provinsi Jambi (Pelabuhan Ekspor/Muara Sabak).
- c. Pembangunan pembangkit listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) dan tenaga Surya serta Jaringan tegangan Rendah (JTR) pada daerah yang belum terjangkau listrik.
- d. Meningkatkan lingkungan perumahan pada kawasan kumuh dan pembangunan jalan setapak, MCK lingkungan.
- e. Mengurangi pencemaran lingkungan melalui perbaikan drainase.

Arah Kebijakan

Dalam upaya meningkatkan pembangunan infrastruktur di Provinsi Jambi, maka arah kebijakan yang ditetapkan adalah sebagai berikut ;

1) Sumberdaya Air

- a. Pembangunan dan rehabilitasi pengamanan sungai di daerah rawan banjir di Kabupaten Batanghari, Sarolangun, Muaro Jambi, Tebo, Merangin, Kerinci dan Kota Jambi.
- b. Pembinaan kelompok Petani Pemakai Air (P3A) di Kabupaten Kerinci, Muaro Jambi, Bungo, Tebo, Sarolangun dan Kota Jambi
- c. Pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi dan rawa Kabupaten Muaro Jambi, Tabo, Sarolangun, Kerinci dan Kota Jambi.
- d. Operasional dan Pemeliharaan (O & P)

2) Transportasi

1. Peningkatan Jalan Dan Penggantian Jembatan Provinsi Di
 - a. Wilayah Timur I (Kabupaten Tanjab Barat)
 - b. Wilayah Timur II (Tanjab Timur)
 - c. Wilayah Timur III (Muaro Jambi)
 - d. Wilayah Tengah I (Bungo)

- e. Wilayah Tengah II (Batanghari dan Muaro Jambi)
 - f. Wilayah Barat I (Kerinci)
 - g. Wilayah Barat II (Merangin)
 - h. Wilayah Barat III (Sarolangun)
2. Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Provinsi di;
 - a. Wilayah Tengah I (Tebo)
 - b. Wilayah Barat IV (Kerinci)
 3. Rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan di jalan Provinsi
 4. Pembangunan Jembatan Batanghari II
 5. Pemeliharaan Rutin Sistem Mandor pada Ruas Jalan Provinsi
 6. Peningkatan jalan dalam kota
 7. Rehabilitasi jalan dalam kota
 8. Percepatan pembangunan pelabuhan Muara Sabak.
 9. Pembangunan fasilitas lalu lintas angkutan jalan dan penanganan daerah rawan kecelakaan ;
 10. Peningkatan pelayanan fasilitas Bandara, Landasan Pacu Sultan Thaha

3) Ketenagalistrikan

Perluasan pelayanan tenaga listrik di wilayah pedesaan dan terpencil melalui pembangunan PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro) dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Kabupaten Merangin dan Kabupaten Bungo.

4) Perumahan dan Pemukiman

- a. Penataan dan revitalisasi kawasan strategis di Provinsi Jambi.
- b. Pembangunan prasarana dan sarana jalan lingkungan (poros desa) di Kabupaten Tebo, Merangin, Tanjab Timur, Kerinci dan Muaro Jambi.
- c. Pembangunan sistem air limbah melalui pembangunan Drainase Primer dan sekunder di Kabupaten Merangin, Tanjab Barat, Sarolangun dan Kota Jambi.

3. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA

Sasaran

Sasaran peningkatan sumber daya Manusia diarahkan pada pembangunan pendidikan dan kesehatan diarahkan untuk mendukung peningkatan derajat kesehatan dan taraf pendidikan masyarakat melalui peningkatan akses terutama penduduk miskin, terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas. Secara lebih rinci sasaran pembangunan pendidikan dan kesehatan antara lain sebagai berikut ;

- a. Meningkatnya Persentase Penduduk yang dapat Mengakses Pelayanan Pendidikan yang diukur antara lain dengan ;
 - (1) Meningkatnya angka partisipasi kasar (APK) jejang SD/SMP/SMA, dan APK jenjang pendidikan tinggi.
 - (2) Meningkatnya angka partisipasi sekolah (APS)
 - (3) Menurunnya angka Buta Aksara ;
- b. Meningkatnya akses masyarakat untuk mendapatkan pendidikan kecakapan hidup.
- c. Meningkatnya keadilan dan kesejahteraan pendidikan antar kelompok masyarakat termasuk antara Wilayah Maju dan tertinggal, antara perkotaan dan pedesaan antara daerah maju dan daerah tertinggal, antara penduduk kaya dan penduduk miskin, serta antara penduduk laki-laki dan perempuan.
- d. Meningkatnya kualitas dan relevansi pendidikan;
- e. Meningkatnya proporsi keluarga hidup secara bersih dan sehat.
- f. Meningkatnya proporsi masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan baik dari puskesmas, Rumah Sakit, maupun Tenaga Kesehatan terlatih.
- g. Menurunnya angka Kesakitan dan Kematian Akibat Penyakit Malaria, Demam Berdarah Dengue (DBD), Tuberkolosis Paru, Diare dan HIV/AIDS.
- h. Menurunnya prevalensi Kurang Gizi pada Balita, dan
- i. Meningkatnya ketersediaan obat esensial nasional.

Arah Kebijakan

Sebagai salah satu pilar terpenting dalam upaya untuk mewujudkan SDM yang berkualitas, pembangunan pendidikan dan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan pemerataan dan keterjangkauan serta kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan. Perhatian khusus diberikan pada pelayanan bagi masyarakat miskin dan penduduk di daerah tertinggal dan daerah bencana. Secara rinci arah kebijakan pembangunan pendidikan dan kesehatan adalah sebagai berikut:

Meningkatkan Pemerataan Dan Keterjangkauan Pelayanan Pendidikan Dan Kesehatan, Yang Dilaksanakan Melalui ;

- (1) Penyelenggaraan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun yang bebas biaya bagi penduduk miskin yang didukung dengan upaya penarikan kembali siswa putus sekolah dan yang tidak melanjutkan ke dalam sistem pendidikan, serta pemberian perhatian pada peserta didik yang mengalami kesulitan belajar, serta penambahan sarana dan prasarana pendidikan untuk meningkatkan daya tampung dan daya jangkau pendidikan dasar.
- (2) Peningkatan intensitas penyelenggaraan pendidikan keaksaraan fungsional terutama bagi penduduk usia 15 tahun dimulai dengan daerah-daerah yang memiliki angka buta aksara tertinggi dan wilayah pedesaan.
- (3) Perluasan dan pemerataan pendidikan menengah jalur formal dan non formal antara lain melalui penambahan sarana dan prasarana pendidikan untuk meningkatkan daya tampung dan daya jangkau pendidikan menengah terutama di wilayah pedesaan dan daerah yang memiliki angka partisipasi lebih rendah dibanding rata-rata nasional dan meningkatkan relevansinya dengan kebutuhan dunia kerja.
- (4) Peningkatan jumlah dan jaringan puskesmas melalui pembangunan, perbaikan, dan pengadaan peralatan medis dan non medis puskesmas dan jaringannya terutama di daerah bencana dan tertinggal, dan
- (5) Pengembangan jaminan kesehatan bagi penduduk miskin dengan melanjutkan pelayanan kesehatan gratis di puskesmas dan kelas III rumah sakit.

b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidik dan Kesehatan, yang dilaksanakan melalui :

- (1) Peningkatan kualitas dan kuantitas pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan peningkatan jumlah peserta didik.
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana pendukung peningkatan kualitas pendidikan seperti perpustakaan dan laboratorium :
- (3) Pengembangan kurikulum, bahan ajar, dan model-model pembelajaran yang mengacu pada standar nasional sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, seni dan kebutuhan pembangunan daerah, wilayah dan kawasan.
- (4) Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan antara lain melalui kebutuhan tenaga kesehatan, terutama untuk pelayanan kesehatan di puskesmas dan jaringannya, serta rumah sakit Provinsi Jambi khususnya di daerah terpencil dan bencana.
- (5) Pemerataan dan peningkatan kualitas fasilitas kesehatan dasar melalui peningkatan pelayanan dan kesehatan dan mencakup sekurang-kurangnya promosi kesehatan, kesehatan ibu dan anak, keluarga dan bencana, perbaikan gizi, kesehatan lingkungan, pemberantasan penyakit menular, dan pengobatan dasar.

c. Pembangunan Pendidikan juga Diarahkan untuk Meningkatkan Relevansi dengan Kebutuhan Pembangunan Melalui antara lain:

- (1) Peningkatan intensitas pendidikan non formal dalam rangka mendukung upaya penurunan jumlah pengangguran dan peningkatan produktivitas tenaga kerja.

d. Memperkuat Manajemen pelayanan pendidikan yang dilaksanakan melalui :

- (1) Penyusunan sistem dan mekanisme perencanaan dan pengelolaan pendidikan.
- (2) Pengaturan inventarisasi dan sistem dokumentasi saran dan prasarana serta asset pendidikan.
- (3) Penguatan system Informasi Pendidikan.
- (4) Peningkatan Kapasitas Aparatur Pendidikan.

4. Turunnya angka pelanggaran dan perusakan sumber daya pesisir dan laut dan membaiknya pengelolaan ekosistem pesisir dan laut yang berbasis masyarakat
5. Berkurangnya kegiatan pertambangan tanpa izin (PETI) dan usaha-usaha pertambangan yang merusak dan menimbulkan pencemaran.

b. Pengembangan Pariwisata melalui :

- (1) Pengembangan destinasi dan jenis wisata unggulan
- (2) Pengembangan jaringan kerjasama pariwisata dan kebudayaan
- (3) Pengembangan nilai budaya daerah
- (4) Pengembangan pemasaran pariwisata

ARAH KEBIJAKAN

Arah dan kebijakan yang ditempuh untuk pengembangan dalam pengelolaan Sumberdaya alam dilakukan melalui :

a. Pembangunan **Kehutanan** diarahkan untuk :

1. Penurunan kegiatan penebangan liar (*illegal logging*) dan perdagangan kayu *illegal*, pembakaran hutan serta perambahan dan okupasi kawasan hutan.
2. Memperbaiki sistem pengelolaan hutan melalui meningkatkan keterlibatan masyarakat secara langsung di dalam dan disekitar hutan
3. Meningkatkan koordinasi dan penguatan kelembagaan dalam wilayah DAS, serta meningkatkan pengawasan dan penegakan hukumnya.
4. Peningkatan pelaksanaan Rehabilitasi dan konservasi sumber daya hutan
5. Mengefektifkan sumber daya yang tersedia dalam pengelolaan hutan.
6. Memanfaatkan hasil hutan non-kayu dan jasa lingkungannya secara optimal

b. Pembangunan **kelautan** diarahkan untuk :

1. Mengelola dan mendayagunakan potensi sumber daya laut pesisir secara lestari berbasis masyarakat

2. Membangun sistem pengendalian dan pengawasan dalam pengelolaan sumber daya laut dan pesisir, yang disertai dengan penegakan hukum yang ketat
 3. Meningkatkan upaya konservasi laut, pesisir serta merehabilitasi ekosistem yang rusak
 4. Mengendalikan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup di wilayah pesisir, laut, perairan tawar.
 5. Menggiatkan kemitraan untuk meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya laut dan pesisir.
- c. Pembangunan **pertambangan** diarahkan untuk
1. Meningkatkan eksploitasi dengan selalu memperhatikan aspek pembangunan berkelanjutan, khususnya mempertimbangkan kerusakan hutan, keanekaragaman hayati dan pencemaran lingkungan.
 2. meningkatkan akurasi data, promosi, dan pelayanan informasi mineral, batubara, air bawah tanah dan panas bumi
 3. Menginventarisasi dan merehabilitasi lahan dan kawasan pasca tambang
 4. meningkatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pertambangan
 5. Meningkatkan pelayanan dan informasi pertambangan

Arah kebijakan pengembangan kebudayaan dan pariwisata yang berlandaskan pada nilai luhur-luhur dilakukan melalui :

1. Pengembangan Pemasaran Pariwisata melalui penyelenggaraan even daerah, event dalam dan luar negeri, promosi melalui media cetak maupun elektronik.
2. Pengembangan Destinasi Pariwisata, dilakukan melalui pengembangan daya tarik wisata, peningkatan mutu pelayanan usaha sarana dan jasa pariwisata.
3. Pengelolaan kekayaan budaya dilakukan melalui peningkatan apresiasi seni, transkripsi dan transliterasi naskah kuno.
4. Pengelolaan Ragam Budaya dilakukan melalui sarasehan dan seni budaya, festival ragam budaya.

BAB V

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

Kerangka Ekonomi Makro dan Pembiayaan Pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKPD) Tahun memberikan gambaran ekonomi makro tahun. dan serta pembiayaan pembangunan yang diperlukan. Gambaran ekonomi tersebut dicapai melalui berbagai prioritas pembangunan serta langkah kebijakan yang disusun untuk menghadapi tantangan pembangunan dalam rangka pencapaian kesasaran pembangunan tahun.

A. KONDISI EKONOMI TAHUN 2009 DAN PERKIRAAN 2010

Penurunan harga premium per 1 Desember 2008 dari Rp 6.000 menjadi Rp 5.500 atau turun sebesar 8,33 persen, kemudian per 15 Desember 2008 premium kembali turun dari Rp 5.500 menjadi Rp 5.000 atau sebesar 9,09 persen dan solar dari 5.500 menjadi Rp 4.800 atau turun sebesar 12,73 persen. Selanjutnya per 1 Februari 2009 terjadi lagi penurunan harga BBM, premium menjadi Rp 4.500 per liter atau turun sebesar 10 persen, solar menjadi Rp 4.500 atau turun sebesar 6,25 persen. Disisi lain harga-harga komoditi sektor perkebunan seperti kelapa sawit dan karet sudah mengalami kenaikan rata-rata sebesar 20 - 40 persen dari harga pada bulan Oktober tahun 2008. Penurunan harga BBM dan kenaikan harga komoditi perkebunan tersebut diperkirakan akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Jambi sekaligus diharapkan dapat menurunkan tingkat inflasi Jambi pada tahun 2009 nanti.

Prediksi pertumbuhan ekonomi Jambi tahun 2009 yang paling moderat adalah antara 5,0 persen hingga 7,0 persen. Pertanyaannya adalah dari mana asal pertumbuhannya ?. Ditinjau dari sisi penggunaan atau permintaan, pertumbuhan PDRB Provinsi Jambi Tahun 2009 masih digerakkan oleh pengeluaran konsumsi rumah tangga diperkirakan

mencapai 65 persen, kemudian pengeluaran konsumsi pemerintah diperkirakan sebesar 17 persen, sehingga secara total kontribusi variabel konsumsi sebesar 82 persen. Artinya jika kita masih bisa menjaga kedua variabel ini, pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi tahun 2009 masih dapat didorong untuk meningkat. Disisi lain kontribusi variabel investasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi hanya sebesar 16 persen, jika dibandingkan dengan nasional, variabel investasi mampu berkontribusi sebesar 25 persen. Dampak dari rendahnya kontribusi investasi dalam pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi, maka pada tahun 2009 tingkat penyerapan tenaga kerja diperkirakan juga masih relatif kecil, disisi lain barang-barang konsumsi yang tingkat permintaannya relatif tinggi hampir semua didatangkan dari luar Provinsi Jambi atau di Produksi didaerah lain baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Keadaan akan berdampak pada tingkat inflasi pada tahun 2009 diperkirakan masih relatif tinggi, namun akan terjadi penurunan inflasi di sektor transportasi dan komunikasi, sedangkan sektor-sektor lain secara signifikan belum tentu turun, karena hampir semua produk konsumsi yang diperdagangkan di Provinsi Jambi tidak punya keterkaitan dengan industrinya.

Kondisi ekonomi Provinsi Jambi tahun 2010 nanti dapat dilihat dari neraca perdagangan, inflasi, keuangan daerah serta kebutuhan investasi dan sumber pembiayaan, yang dapat mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah.

Laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi selama tahun 2007 sebesar 6,82 persen dan tahun 2008 mencapai 7,16 persen dan diharapkan pada tahun 2009 ini akan mencapai 5 – 7 persen, lebih tinggi dari target nasional yang hanya sebesar 4,0 – 5,5 persen. Pertumbuhan ekonomi Jambi Tahun 2010 diperkirakan dapat mencapai 6 – 8 persen. Peningkatan pertumbuhan ekonomi ini didorong oleh peningkatan PDRB pada tahun 2009 akan mencapai Rp17,43 Triliun atas harga konstan dan perkiraan pada tahun 2010 akan naik menjadi Rp.18,65 Triliun. Peningkatan ini juga diikuti oleh kenaikan PDRB Perkapita berdasarkan

harga konstan menjadi Rp. 5,492 juta tahun 2008 dan diperkirakan pada tahun 2010 akan mencapai Rp. 6,492 juta.

Struktur perekonomian Provinsi Jambi pada tahun 2008 masih didominasi oleh sektor pertanian dengan kontribusi sebesar 23,47 persen, sektor pertambangan dan penggalian sebesar 25,92 persen, sektor perdagangan Hotel dan Restoran 13,48 persen, diikuti sektor industri pengolahan sebesar 11,52 persen. Sektor Jasa sebesar 9,76 persen, Pengangkutan dan Komunikasi sebesar 6,31 persen. Sesuai dengan visi misi Gubernur Jambi, dalam upaya peningkatan nilai tambah (*value added*) dan rantai nilai (*value chain*) dari produk-produk pertanian, maka pengembangan industri hilir menjadi prioritas pada tahun 2010 nanti. Berkenaan dengan itu, diperkirakan sektor pertanian pada tahun 2010 kontribusinya akan mengalami sedikit penurunan. Sedangkan sektor lainnya diperkirakan relatif stabil peningkatannya.

a. Neraca Perdagangan

Perkembangan neraca perdagangan Provinsi Jambi dapat dilihat dari pergerakan perdagangan ekspor dan impor daerah ini. Perkiraan neraca perdagangan sangat terkait dengan sasaran laju pertumbuhan ekonomi dan laju pertumbuhan ekspor serta perkiraan pertumbuhan investasi.

Dengan membaiknya perkembangan ekonomi nasional dan global pada tahun 2010 nanti yang didorong oleh pelaksanaan berbagai program stimulus fiskal dan prioritas pembangunan antara lain untuk peningkatan daya saing ekonomi serta upaya-upaya untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan ekspor, walaupun persaingan di pasar internasional yang semakin ketat, nilai ekspor nonmigas Jambi pada tahun 2008 meningkat sebesar 29,63 persen, dan pada tahun 2009 ini diperkirakan meningkat rata-rata sebesar 20,5 persen. Sedangkan pada tahun 2010 nilai ekspor diperkirakan akan meningkat sebesar 25,7 persen. Sementara itu, ekspor migas, khususnya minyak bumi di Provinsi Jambi, sangat tergantung kepada perkembangan harga minyak dunia,

pada tahun 2009 dan 2010 harganya diperkirakan akan mengalami penurunan. Dari sisi impor, sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan investasi terutama di sektor perdagangan, nilai impor barang-barang konsumsi diperkirakan meningkat. Disisi lain penerimaan dari sektor jasa pariwisata diperkirakan masih relatif kecil, namun sangat potensi untuk dikembangkan pada masa-masa mendatang terutama daerah Kerinci, Tanjung Jabung Timur dan Tanjung Jabung Barat.

b. Laju Inflasi

Prediksi tingkat inflasi pada tahun 2009 diperkirakan akan lebih rendah dari tingkat inflasi tahun 2008, namun inflasinya masih mendekati dua digit yaitu antar 8 hingga 9 persen. Untuk perekonomian Jambi tingkat inflasi sangat sensitif terhadap kenaikan harga BBM, hal ini dapat dilihat kenaikan harga BBM pada tahun 2005 yang telah mendorong inflasi disektor transportasi sebesar 52 persen, sehingga inflasi total pada tahun 2005 mencapai 16,50 persen. Namun biasanya penurunan harga BBM, tidak serta merta menurunkan harga barang-barang, kecuali transportasi yang dapat langsung turun, sehingga dampaknya terhadap penurunan inflasi juga diperkirakan relatif kecil. Jika tingkat inflasi menurun dan rendah diharapkan pada tahun 2009 terjadi penurunan tingkat suku bunga, dengan suku bunga rendah gairah konsumsi dan investasi dapat tetap dipertahankan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi Jambi tahun 2009, dengan terdus berupaya mengembangkan industri hilir yang akan menghasilkan barang-barang jadi.

Pada tahun 2007 laju inflasi Daerah Jambi sebesar 7,42 persen, dan pada tahun 2008 laju inflasi meningkat cukup tajam menjadi 11,66 persen. Namun pada tahun 2009 dan 2010 laju inflasi diperkirakan akan menurun. Perkiraan tersebut dengan sasaran tingkat inflasi yang rendah dan stabil tetapi dengan tetap memperhatikan pertumbuhan ekonomi. Pencapaian sasaran inflasi tersebut didukung oleh relatifnya stabilnya harga-harga melalui penyediaan barang-barang kebutuhan masyarakat,

hal ini juga dapat terbantu jika nilai kurs rupiah relatif stabil. Jika iklim usaha dan situasi keamanan yang kondusif serta pemerintah daerah mampu mengatasi berbagai hambatan investasi, maka diperkirakan masuknya *capital inflow* ke Jambi melalui investasi baik PMDN maupun PMA.

c. Keuangan Daerah

Pada sisi Keuangan Daerah yang tercermin di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jambi, dijelaskan bahwa sumber pembiayaan pembangunan diperoleh dari berbagai sumber diantaranya berasal dari pendapatan asli daerah, berupa sisa lebih perhitungan anggaran tahun yang lalu, pajak dan retribusi daerah, bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak, dana perimbangan berupa dana alokasi umum dan penerimaan lain-lain yang sah. Dari semua penerimaan tersebut yang memberikan kontribusi yang cukup besar berasal dari instansi yang lebih tinggi atau bantuan dari pemerintah pusat, sedangkan sumber penerimaan daerah yang berasal dari penerimaan sendiri (PDS) masih terlalu kecil dibandingkan dengan bantuan pusat. Hal ini menunjukkan bahwa, Provinsi Jambi selama ini dalam pembiayaan administrasi pemerintahan dan pembangunannya masih sangat tergantung dari pemerintah pusat, terutama untuk belanja pegawai berupa gaji, yang masih diharapkan dari pemerintah pusat.

Secara umum gambaran perkembangan dan ralisasi pendapatan daerah Provinsi Jambi tahun 2008, memperlihatkan peningkatan yang cukup signifikan. APBD Provinsi Jambi tahun 2008 berjumlah Rp 1,615 triliun, yang terdiri dari pendapatan sebesar Rp 1,261 triliun. Angka ini diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditargetkan sebesar Rp 454,44 miliar, terealisasi sebesar Rp 624,81 miliar atau 137,71 persen. Pendapatan Transfer berupa Dana Perimbangan dan Dana Penyesuaian ditargetkan sebesar Rp 748,33 miliar, terealisasi sebesar Rp 745,86 miliar atau 99,67 persen. Dana Penerimaan Lain-lain yang ditargetkan Rp.

58,699 miliar, terealisasi sebesar Rp. 64,41 miliar atau 109,78 persen. Kemudian penerimaan pembiayaan berupa sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya yang direncanakan sebesar Rp. 359,487 miliar terealisasi 100 persen yang digunakan untuk menutupi defisit yaitu selisih total belanja dibanding total pendapatan tahun anggaran 2008

Penerimaan Daerah Sendiri (PSD) yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sisa perhitungan anggaran tahun lalu memberikan kontribusi yang terus meningkat secara positif, walaupun perkembangannya meningkat, akan tetapi masih kecil apabila dibandingkan dengan ketergantungan daerah ini terhadap pemerintah pusat, walaupun tingkat ketergantungan daerah ini terhadap pemerintah pusat setiap tahunnya mengalami penurunan secara presentase, akan tetapi secara nominal bantuan yang diterima pemerintah daerah Provinsi Jambi terus meningkat dalam jumlah yang cukup besar, Kondisi ini mencerminkan bahwa sumber pembiayaan daerah ini masih mengharapkan dari pemerintah pusat, karena objek pajak yang ada di Provinsi sangat terbatas pendapatan daerahnya. Diperkirakan pada tahun 2010 realisasi pendapatan akan Rp 2,1 Triliun, sehingga akan melampaui target yang telah ditentukan sebesar Rp 1,89 triliun.

Di sisi belanja daerah, terjadi peningkatan alokasi anggaran untuk sektor pendidikan, kesehatan, meningkatkan akses penduduk untuk mendapatkan perumahan yang layak, meningkatkan ketahanan pangan serta meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur di perdesaan. Disamping itu, terjadi penurunan subsidi secara bertahap terutama subsidi yang tidak terarah pada masyarakat miskin (*untargeted subsidy*), dan pengendalian peningkatan anggaran untuk belanja pegawai.

Dari urutan di atas, meningkatnya kesejahteraan rakyat melalui peningkatan kualitas pertumbuhan, serta didorong oleh pertumbuhan ekonomi, dan disertai dengan pemantapan stabilitas ekonomi, akan dapat dicapai. Provinsi Jambi secara bertahap akan mampu mengurangi tingkat pengangguran dan jumlah penduduk miskin. Kondisi perekonomian

seperti ini yang bersinergi dengan keberhasilan dalam melaksanakan berbagai upaya pembangunan lainnya akan membawa Provinsi Jambi pada kemajuan dan membawa masyarakat Jambi pada keadaan yang sejahtera.

d. Kebutuhan Investasi dan Sumber Pembiayaan

Salah satu masalah yang penting guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan basis ekonomi yang baik adalah tingkat efisiensi dari perekonomian, dalam hal ini tingkat efisiensi penggunaan modal. Secara makro efisiensi penggunaan modal dapat diukur dengan konsep ICOR (*Increment Capital Output Ratio*) yaitu rasio antara proporsi investasi terhadap PDRB dan laju pertumbuhan ekonomi, atau dengan kata lain ICOR merupakan besar satuan kapital (investasi) yang dibutuhkan untuk menciptakan satu satuan produksi (pertumbuhan ekonomi). Dimana semakin rendah nilai ICOR maka pemanfaatan modal dalam proses produksi semakin efisien.

Berdasarkan berbagai langkah perbaikan investasi yang dilakukan di berbagai bidang, tingkat efisiensi kegiatan ekonomi yang diukur dengan *Incremental Capital Output Ratio* (ICOR) diperkirakan mengalami perbaikan. Pada tahun 2008 ICOR sekitar 3,65 ; dan diperkirakan pada tahun 2010 menurun menjadi 3,50.

Berdasarkan perkiraan tingkat efisiensi investasi tersebut, untuk mencapai sasaran pertumbuhan rata-rata sebesar 6-7 persen pada tahun 2010 dibutuhkan investasi diperkirakan mencapai Rp 17,01 triliun. Kebutuhan investasi tersebut terutama dibiayai APBD dan APBN yang masuk ke Provinsi Jambi, kemudian dari tabungan masyarakat baik melalui investasi fasilitas maupun non fasilitas. Investasi fasilitas yang dilakukan oleh swasta baik melalui PMDN maupun PMA sangat tergantung pada seberapa menarik Jambi sebagai investasi yang menguntungkan.

Untuk dapat meningkatkan investasi swasta masuk ke Jambi, maka perlu strategi, peraturan yang konsisten, penegakan hukum yang tegas, keamanan, dan iklim yang kondusif. Disamping itu perlu usaha-usaha gigih memperkenalkan Jambi melalui berbagai forum baik regional maupun internasional.

Berkenaan dengan itu peranan investasi swasta dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi sangat besar. Salah satu cara mendorong peningkatan investasi swasta ke Jambi adalah dengan membuat regulasi yang dapat merangsang dan menguntungkan investor, disamping menciptakan suasana yang kondusif dan stabil.

Kebutuhan investasi tersebut dibiayai terutama dari tabungan dalam negeri, baik pemerintah maupun masyarakat. Seiring meningkatnya penerimaan Pemerintah daerah serta relatif terkendalinya pengeluaran rutin. Penerimaan Pemerintah Daerah diperkirakan meningkat. Adapun tabungan masyarakat diperkirakan meningkat yang tergambar dari simpanan dana pihak ketiga di perbankan daerah Jambi. Dana-dana masyarakat tersebut selain langsung diinvestasikan sendiri juga disalurkan antara lain melalui perbankan, pasar modal, atau lembaga keuangan lainnya seperti asuransi dan dana pensiun. Dengan pelaksanaan berbagai langkah terobosan, berbagai sumber dana dalam negeri diharapkan dapat ditingkatkan dan menjadi sumber dana investasi, antara lain melalui peningkatan penerimaan pajak dan bukan pajak, optimalisasi sumber daya alam (misalnya melalui pencegahan pencurian sumber daya laut, serta sumber daya hutan dan mineral), serta optimalisasi dana terkait keagamaan seperti dana wakaf, zakat dan sebagainya.

B. LINGKUNGAN EKSTERNAL DAN INTERNAL TAHUN 2010

Gambaran ekonomi Provinsi Jambi tahun 2010 akan dipengaruhi perkembangan lingkungan eksternal sebagai akibat, semakin meningkatnya integrasi perekonomian dunia yang pada satu pihak akan menciptakan peluang yang lebih besar bagi perekonomian daerah. Tetapi

di lain pihak juga menuntut daya saing perekonomian daerah yang lebih tinggi. Dorongan eksternal perekonomian daerah Jambi berasal dari perekonomian dengan motor penggerak perekonomian negara-negara industri di Asia lainnya.

Adapun lingkungan internal yang diperkirakan berpengaruh positif terhadap perekonomian daerah dalam tahun 2010 adalah sebagai berikut.

Pertama, ekspektasi masyarakat tetap kuat dorongan oleh rencana dan pelaksanaan program-program pembangunan yang terarah dan konsisten sesuai dengan dokumen perencanaan dan melalui tahapan Musyawarah Perencanaan Pembangunan. **Kedua**, pemerintahan yang kuat didukung oleh seluruh masyarakat akan mempercepat penyelesaian konflik kebijakan antara pusat dan daerah, kebijakan lintas sektor, serta kebijakan-kebijakan sektoral yang menghambat terciptanya iklim usaha yang sehat yang pada gilirannya akan menciptakan kepastian hukum bagi peningkatan kegiatan ekonomi. **Ketiga**, sejalan dengan meningkatnya kepastian politik, kemampuan untuk menegakkan keamanan dan ketertiban serta pelaksanaan hukum, termasuk dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, juga meningkat. **Keempat**, meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap berbagai pelaksanaan program pembangunan pada gilirannya akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi.

C. TANTANGAN POKOK

Dengan kemajuan yang dicapai dan masalah yang dihadapi hingga tahun 2008, tantangan pokok yang dihadapi tahun 2010 adalah sebagai berikut.

1. MENINGKATKAN KUALITAS PERTUMBUHAN EKONOMI. Dengan jumlah pengangguran yang semakin bertambah, kualitas pertumbuhan perlu ditingkatkan agar kegiatan ekonomi dapat menciptakan lapangan kerja yang lebih besar dan mengurangi jumlah penduduk miskin. Sejak

krisis, lapangan kerja yang diciptakan oleh kegiatan ekonomi makin menurun, kerawanan pangan dan kurangnya penanganan masalah gizi dan rendahnya kemampuan daya beli harus terus ditingkatkan dalam rangka mendorong kualitas pertumbuhan ekonomi daerah.

2. **MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI.** Tantangan ini cukup berat mengingat kondisi sektor riil yang belum sepenuhnya pulih; dilandasi dengan masih awalnya peningkatan investasi dan ekspor non-migas dan masih banyaknya kendala di daerah yang menghambat peningkatan investasi dan ekspor non-migas secara berkelanjutan.
3. **MENJAGA STABILITAS EKONOMI.** Berkaitan dengan kemungkinan timbulnya gejolak ekonomi baik yang berasal dari luar, yang mengakibatkan tidak terkendalinya inflasi akan mempengaruhi dari tingkat daya beli masyarakat serta akan membawa dampak bagi stabilitas ekonomi daerah.

D. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI MAKRO

Dalam tahun, kebijakan ekonomi makro diarahkan untuk **MENINGKATKAN KUALITAS DAN SEKALIGUS PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH AGAR MAMPU MEMECAHKAN MASALAH-MASALAH SOSIAL MENDASAR** terutama pengangguran dan kemiskinan dengan tetap mempertahankan stabilitas ekonomi.

Dengan terbatasnya kemampuan keuangan daerah, maka ruang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi relatif terbatas. Untuk itu **KEBIJAKAN EKONOMI MAKRO DAERAH DIARAHKAN UNTUK MENDORONG SECEPATNYA PERANAN MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN** dengan menghilangkan berbagai kendala yang menghambat. Disamping itu langkah-langkah kebijakan lebih serius ditempuh untuk meningkatkan pemerataan dan sekaligus mendorong potensi pembangunan yang belum termanfaatkan selama ini antara lain di sektor pertanian, industri, dan di wilayah pedesaan. Hanya dengan demikian pemecahan masalah-masalah

sosial mendasar seperti kemiskinan dan pengangguran dapat segera dipecahkan.

Dalam kaitan itu, pertumbuhan ekonomi didorong terutama dengan meningkatkan investasi dan ekspor non-migas. Peningkatan investasi dan daya saing ekspor dilakukan dengan mengurangi hambatan-hambatan yang ada yaitu dengan menyederhanakan prosedur perijinan, mengurangi tumpang tindih kebijakan antara pusat dan daerah serta antar sektor, meningkatkan kepastian hukum terhadap usaha, menyetatkan iklim ketenagakerjaan, meningkatkan penyediaan infrastruktur, menyederhanakan prosedur, serta meningkatkan fungsi intermediasi perbankan dalam menyelurkan kredit kepada sektor usaha kecil dan menengah terus dilakukan dan dikembangkan.

Selanjutnya, kualitas pertumbuhan ekonomi ditingkatkan dengan mendorong pemerataan pembangunan antara lain dengan mendorong pembangunan pertanian dan meningkatkan kegiatan ekonomi perdesaan. Kualitas pertumbuhan juga didorong dengan memperbaiki iklim ketenagakerjaan yang mampu meningkatkan penciptaan lapangan kerja dengan mengendalikan kenaikan Upah Minimum Provinsi agar tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan laju inflasi, memastikan biaya-biaya non-UMP mengarah pada peningkatan produktivitas tenaga kerja, serta membangun hubungan industrial yang harmonis antara perusahaan dan tenaga kerja. Kualitas pertumbuhan juga didorong dengan meningkatkan akses usaha kecil, menengah, dan koperasi terhadap sumber daya pembangunan. Upaya untuk mengurangi jumlah penduduk miskin akan didorong oleh berbagai kebijakan lintas sektor mengarah pada penciptaan kesempatan usaha bagi masyarakat miskin, pemberdayaan masyarakat miskin, peningkatan kemampuan masyarakat miskin, serta pemberian perlindungan sosial bagi masyarakat miskin.

Stabilitas ekonomi dijaga melalui pelaksanaan kebijakan untuk tetap memberi ruang gerak bagi peningkatan kegiatan ekonomi. Stabilitas ekonomi dalam tahun mendatang juga akan didukung dengan ketahanan

sektor keuangan melalui penguatan dan pengaturan jasa keuangan, perlindungan dana masyarakat, serta peningkatan koordinasi berbagai otoritas keuangan melalui jaring pengaman sistem keuangan secara bertahap.

E. PROSPEK EKONOMI TAHUN 2010

Kombinasi antara inflasi rendah dan suku bunga rendah diharapkan dapat mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi tahun 2010. Disamping itu belanja pemerintah melalui APBN dan APBD serta momentum Pemilu 2009 melalui anggarannya diharapkan dapat menjadi salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi. Kenaikan harga komodit perkebunan Provinsi Jambi yang sebagian besar di ekspor, diharapkan dapat meningkatkan surplus perdagangan luar negeri Jambi. Kenaikan harga ini diharapkan dapat terus berlanjut pada tahun 2010 sejalan dengan membaiknya perekonomian global, sehingga dapat merangsang kembali gairah petani perkebunan di Provinsi Jambi untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksinya. Peningkatan permintaan pasar internasional di awal tahun 2009 ini terhadap komoditi perkebunan juga telah mendorong perbaikan harga komoditi tersebut, momentum ini diharapkan dapat mengurangi tekanan pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor industri perkebunan seperti pabrik kelapa sawit (PKS) ataupun pabrik crum rubber.

Dengan demikian diharapkan prospek ekonomi Provinsi Jambi Tahun 2010 akan lebih baik dibandingkan tahun 2008 dan 2009 ini, sehingga dapat menciptakan kesempatan kerja, penurunan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dengan pokok-pokok arah kebijakan ekonomi makro di atas serta dengan memperhatikan kondisi eksternal dan internal yang mempengaruhi perekonomian daerah Jambi, prospek ekonomi tahun 2010 adalah sebagai berikut.

1. BERKURANGANNYA JUMLAH PENDUDUK MISKIN DAN PENGANGGURAN

Berbagai kebijakan yang terkait dengan prioritas pembangunan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dan pengangguran, termasuk pembangunan pertanian dan ekonomi perdesaan, serta pelaksanaan kebijakan di berbagai bidang yang meningkatkan kegiatan ekonomi di berbagai sektor diperkirakan akan menurunkan jumlah pengangguran terbuka dari 5,91 persen dari total angkatan total angkatan kerja pada tahun 2008 diperkirakan menjadi 5,25 persen pada tahun 2010. Peningkatan pertumbuhan ekonomi 6-7 persen tahun 2010 akan dapat mendorong penciptaan kesempatan kerja, disamping itu membaiknya iklim ketenagakerjaan akan meningkatkan kembali penciptaan kesempatan kerja yang cukup besar. Laju peningkatan kesempatan kerja selama tahun 2008 sebesar 3,12 persen dan tahun 2010 diperkirakan akan tumbuh sebesar 3,5 persen, namun daya serap sektor industri kedepan akan lebih besar dibandingkan dengan sektor pertanian. Oleh karena itu pengembangan sektor industri hilir menjadi mutlak untuk didorong dan diprioritaskan kedepan.

Walaupun telah dapat dicapai berbagai keberhasilan, namun dalam upaya penurunan kemiskinan belum sesuai dengan harapan kita. Dari hasil survei SUSENAS tahun 2005 jumlah penduduk miskin mencapai 317.800 orang atau 11,88 persen dari jumlah penduduk, kemudian pada tahun 2006 naik menjadi 335.689 orang atau 12,72 persen. Kenaikan ini seperti Kita ketahui bersama tidak terlepas dari terjadinya kenaikan harga BBM pada bulan Oktober 2006, yang menyebabkan tingkat inflasi mencapai 10,66 persen, dan mengakibatkan turunnya daya beli masyarakat. Sedangkan penduduk miskin tahun 2007 menurun menjadi 281.900 orang atau 10,27 persen dari jumlah penduduk. Terjadinya penurunan ini tidak terlepas dari peningkatan pendapatan masyarakat terutama pada sektor basis pertanian yang diakibatkan oleh naiknya harga produk perkebunan terutama Kelapa Sawit.

Diharapkan pada tahun 2010 jumlah penduduk miskin akan berkurang secara signifikan, diperkirakan jumlah penduduk miskin tahun 2010 hanya sebesar 125.000 rumah tangga atau sekitar 250.000 orang penduduk miskin atau hanya tinggal sekitar 9 persen dari total penduduk.

2. MENINGKATNYA PERTUMBUHAN EKONOMI

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikator dari dampak kebijaksanaan pembangunan yang dilaksanakan khususnya dalam bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan kontribusi dari pertumbuhan berbagai macam sektor ekonomi, yang secara tidak langsung menggambarkan tingkat perubahan ekonomi yang terjadi. Bagi daerah, indikator ini penting untuk mengetahui keberhasilan pembangunan yang telah dicapai dan berguna untuk menentukan arah pembangunannya dimasa yang akan datang.

Berbagai langkah kebijakan untuk meningkatkan investasi dan ekspor sektor non-migas serta tetap terjaganya kepercayaan masyarakat akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari 6,82 persen pada tahun 2007 diperkirakan akan meningkat menjadi 6-8 persen tahun 2010. Dengan pertumbuhan penduduk rata-rata sekitar 1,56 persen pertahun, pendapatan PDRB perkapita berdasarkan harga konstan dari Rp. 5,2 juta pada tahun 2007 diperkirakan meningkat menjadi Rp 6,49 juta tahun 2010.

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi didorong oleh investasi; konsumsi masyarakat; serta ekspor barang dan jasa. Investasi (PMTB); ekspor barang dan jasa; serta konsumsi masyarakat; serta ekspor barang dan jasa. Investasi (PMTB); ekspor barang dan jasa; serta konsumsi masyarakat diperkirakan akan mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan.

Dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi terutama didorong sektor industri pengolahan non-migas yang diperkirakan tumbuh lebih tinggi dari pertumbuhan sektor migas yaitu dari 7,36 persen pada tahun

2008, diperkirakan akan meningkat menjadi 7,6 persen pada tahun 2010 terutama didorong oleh subsektor industri makanan-minuman, industri kertas dan barang cetakan. Sementara itu sektor pertanian dalam arti luas diperkirakan tumbuh sekitar 5,0-6,5 persen terutama didorong oleh subsektor perkebunan, tanaman bahan makanan, perikanan dan peternakan.

BAB VI

KAIDAH PELAKSANAAN

Dinas/Instansi/Lembaga Pemerintah Daerah wajib menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya untuk pencapaian sasaran program-program yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKPD) ini.

Pelaksanaan semua kegiatan, baik dalam “kerangka regulasi” maupun dalam “kerangka anggaran” (*budget intervention*), mensyaratkan pentingnya keterpaduan dan sinkornisasi antar kegiatan, baik di antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan peran/tanggung-jawab/tugas yang melekat pada pemerintah provinsi, Provinsi Jambi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mencapai keterpaduan dan sinkornisasi pelaksanaan kegiatan yang telah terprogramkan, dapat dimanfaatkan antara lain melalui forum musyawarah koordinasi perencanaan, seperti MUSRENBANGPROV di tingkat provinsi, MUSRENBANGDA di tingkat Provinsi Jambi, dan MUSRENBANGNAS di tingkat nasional.

RKP Tahun 2010 merupakan acuan bagi Dinas/Instansi/Lembaga Pemerintah Daerah maupun masyarakat termasuk dunia usaha sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaan program pembangunan.

Untuk itu, perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Dinas/Instansi/Lembaga pemerintah daerah, serta masyarakat termasuk dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan program-program RKPD Tahun 2010 dengan sebaik-baiknya.
2. Bagi Pemerintah Daerah (Provinsi/Provinsi Jambi), RKPD Tahun 2010 merupakan acuan dan pedoman dalam menyusun kebijakan politik, baik berupa kerangka regulasi maupun kerangka anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2010. Untuk mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi dan

harmonisasi pelaksanaan setiap program dalam rangka koordinasi perencanaan, masing-masing instansi daerah perlu membuat Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKSKPD) Tahun 2010 sebagai berikut :

- a. Uraian penggunaan APBD Tahun Anggaran 2010, yang merupakan program yang dipergunakan untuk mencapai prioritas pembangunan nasional/daerah yang berupa kerangka regulasi sesuai dengan kewenangannya dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Gubernur/Bupati/Wali Kota;
 - b. Uraian rencana penggunaan APBD Tahun Anggaran 2010, yang merupakan program, yang dipergunakan untuk mencapai prioritas pembangunan nasional/daerah, yang berupa kerangka anggaran sesuai dengan kewenangannya;
 - c. Uraian sebagaimana yang dimaksud butir b di atas, perlu juga menguraikan kewenangan pengguna anggaran yang bersangkutan, sebagai tugas pemerintah daerah, sebagai tugas dekonsentrasi yang diterima pemerintah propinsi dari pemerintah pusat, atau sebagai tugas pembantuan yang diterima pemerintah Provinsi Jambi dari pemerintah pusat;
 - d. Pemerintah daerah wajib menyampaikan rancangan APBD Tahun Anggaran 2010 dari masing-masing instansi daerah, yang dilaksanakan langsung sebagai kewenangan daerah.
3. Pemerintah Pusat, dengan dikoordinasikan oleh Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional, dengan mendapatkan masukan dari seluruh RKKL dan RKPD propinsi dan kabupaten kota, sebagaimana yang dimaksud butir 2 di atas, dan merumuskan matriks rencana tindak untuk setiap bidang pembangunan (matriks rencana tidak menjadi lampiran dari setiap bidang pembangunan) menjadi dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKPD) Tahun 2010.
 4. Masyarakat luas dapat berperanserta seluas-luasnya dalam perencanaan dan perumusan kebijakan yang nantinya akan dituangkan dalam produk peraturan perundang-undangan. Berkaitan

dengan pendanaan pembangunan, masyarakat luas dan dunia usaha, dapat diperanserta dalam pembangunan yang direncanakan melalui program-program pembangunan berdasarkan rancangan peranserta masyarakat dalam kegiatan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masyarakat luas juga dapat berperanserta untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan;

5. Dalam membuat RKSKPD, Dinas/Instansi pemerintah daerah wajib melakukan penjaringan aspirasi masyarakat dan dunia usaha dalam forum-forum konsultasi, dengar pendapat publik (*public hearing*), dan forum lintas pelaku sesuai dengan kebutuhannya masing-masing;
6. Pada akhir tahun anggaran 2010, setiap instansi pemerintah wajib melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan, maupun kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBN/APBD, serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan APBN/APBD dan peraturan-peraturan lainnya;
7. Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, setiap Pemerintah Daerah (Provinsi/Provinsi Jambi) wajib melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan melakukan tindakan koreksi yang diperlukan dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala 3 (tiga) bulanan kepada Gubernur/Bupati/Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

BAB VIII

PENUTUP

RKPD Provinsi Jambi Tahun 2010 merupakan formulasi kebijakan yang merupakan penjabaran dari RPJM Tahun 2005-2010, dan mengacu pada RKP Nasional, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pernerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dukungan berupa pemberian masukan dan keterlibatan monitoring dan pengendalian pekerjaan ataupun proyek pembangunan yang tahun 2010 adalah tugas yang harus dilaksanakan bersama demi mencapai tujuan dan hasil pembangunan yang optimal. Hanya dengan demikian maka seluruh capaian hasil pembangunan akan dapat menghantarkan penduduk dan masyarakat Provinsi Jambi ke tingkat pembangunan yang lebih tinggi.

Oleh karena itu, dukungan pembiayaan juga menjadi salah satu penentu terhadap kelancaran seluruh pekerjaan dimasa depan. Lebih dari itu, dukungan politik dari Dewan Perwakilan Rakyat menjadi syarat mutlak dari pada pelaksanaan RKPD 2010. Walaupun tantangan menghadang, percepatan pelaksanaan pembangunan harus dilaksanakan sedemikian rupa sehingga dapat diperoleh hasil nyata dari pada pembangunan itu sendiri.

GUBERNUR JAMBI

H.ZULKIFLI NURDIN